



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN

JAYAWIJAYA 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas PerkenanNya Kabupaten Jayawijaya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2018 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

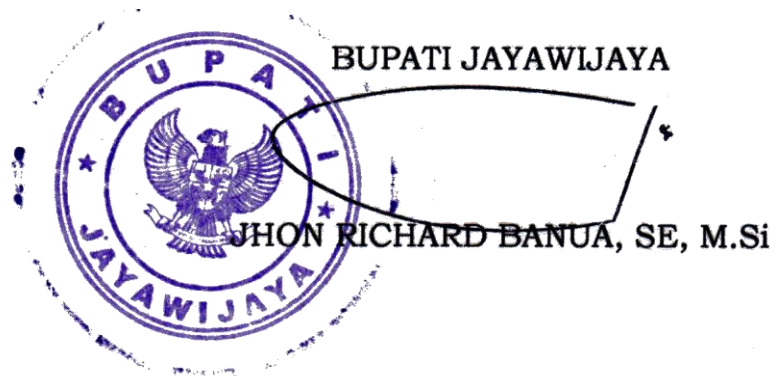
Secara substantif, LKJIP Kabupaten Jayawijaya merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui LKJIP, Kabupaten Jayawijaya melaporkan kinerjanya di mana penilaian pencapaian kinerja dilakukan dengan menganalisa pencapaian kinerja/realisasi kegiatan yang dilakukan di tahun 2018 dengan melihat target yang telah ditentukan. Penilaian pencapaian kinerja ini merujuk pada indikator kinerja *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan. LKJIP Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2013-2018. Hal tersebut merupakan wujud dari keinginan Kabupaten Jayawijaya untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam rangka terwujudnya *Clean Governance* dan *Good Governance*.

LAKIP Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 disusun berdasarkan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2013-2018.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya, semoga laporan akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Kabupaten Jayawijaya.

Wamena, Maret 2019



IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Terkait dengan hal tersebut diperlukan penerapan suatu sistem pelaporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, cepat dan akurat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Jayawijaya disusun. LKJIP ini menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya selama tahun 2014-2018 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban. Capaian kinerja ini tentunya bukan hanya capaian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya semata tetapi juga menggambarkan capaian kinerja seluruh OPD, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum.

Secara ringkas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja misi *Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* dengan 4 sasaran yang terdiri dari 7 indikator kinerja memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 91,14 persen dengan predikat Sangat Berhasil.
2. Hasil evaluasi capaian kinerja misi *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia* dengan 3 sasaran yang terdiri dari 6 indikator kinerja memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 108,67 persen dengan predikat Sangat Berhasil
3. Hasil evaluasi capaian kinerja misi *Meningkatkan Perlindungan Nilai-Nilai Budaya* dengan 2 sasaran yang terdiri dari 2 indikator kinerja memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 49,79 persen dengan predikat Kurang Berhasil.
4. Hasil evaluasi capaian kinerja misi *Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengembangkan Ekonomi Lokal* dengan 2 sasaran yang terdiri dari 4

indikator kinerja memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,67 persen dengan predikat Sangat Berhasil.

5. Hasil evaluasi capaian kinerja misi *Meningkatkan Infrastruktur Daerah 2* sasaran yang terdiri dari 3 indikator kinerja memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 77,92 persen dengan predikat Berhasil.
6. Hasil-hasil evaluasi capaian kinerja di atas menunjukkan hasil yang baik karena dari 5 misi, 3 berpredikat Sangat Berhasil, 1 berpredikat Berhasil dan 1 berpredikat Kurang Berhasil. Namun target pencapaian IKU dapat terealisasi 86,43 persen dari target 80 persen.

Hasil ini akan tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar gambar	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Jayawijaya	
1.2.1 Kondisi Geografis.....	2
1.2.2 Kondisi Demografis.....	5
1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	7
1.4 Kondisi pemerintahan.....	9
1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara	13
1.6 Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	14
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2018	15
2.1 Rencana Strategis 2013-2018	15
2.1.1 Visi	15
2.1.2 Misi	16
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	17
2.1.4 Kebijakan dan Program.....	27
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018.....	29
2.3 Perjanjian Kinerja	32
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN JAYAWIJAYA.....	35
3.1 Capaian Kinerja	35
3.2 Akuntabilitas Kinerja	39
3.3 Realisasi Anggaran	68
 BAB IV PENUTUP	71
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Distrik, Kampung dan Kelurahan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Jayawijaya	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018	7
Tabel 1.4	Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Yang Menjadi Kewenangan Daerah	12
Tabel 1.5	Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2018	14
Tabel 2.1	Matriks Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jayawijaya.....	22
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya	30
Tabel 3.1	Pengukuran Dengan Skala Ordinal	36
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2018	37
Tabel 3.3	Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 menurut Tingkat Pendidikan	40
Tabel 3.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018	41
Tabel 3.5	Data Wajib KTP Penduduk Kabupaten Jayawijaya Tingkat Distrik Tahun 2018	43
Tabel 3.6	Jumlah Perekaman dan Pencetakan KTP Tahun 2014-2018	44
Tabel 3.7	Komponen Penilaian SAKIP	46
Tabel 3.8	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2014-2018	47
Tabel 3.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya menurut Komponen, 2013-2017	55
Tabel 3.10	PDRB, PDRB Per Kapita, PDRB Per Kapita Per Bulan, PDRB Per Kapita (Ribu Rp), 2014-2017.....	60
Tabel 3.11	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2017.....	61
Tabel 3.12	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018	62
Tabel 3.13	Pendapatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018	63
Tabel 3.14	Produksi dan Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Utama Lokal di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018	64
Tabel 3.15	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2018	66
Tabel 3.16	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Unaudited) Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Luas Kabupaten Jayawijaya Dibedakan Menurut Penggunaannya....	3
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kabupaten Jayawijaya	4
Gambar 3.1	Angka Meleh Huruf Kabupaten Jayawijaya.....	49
Gambar 3.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2017.....	50
Gambar 3.3	Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir di Kabupaten Jayawijaya (Tahun), 2013-2017	52
Gambar 3.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya, 2013-2017	54
Gambar 3.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2017	56
Gambar 3.6	Jumlah Orang Bekerja di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2017.	56

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Jayawijaya

1.2.1 Kondisi Geografis

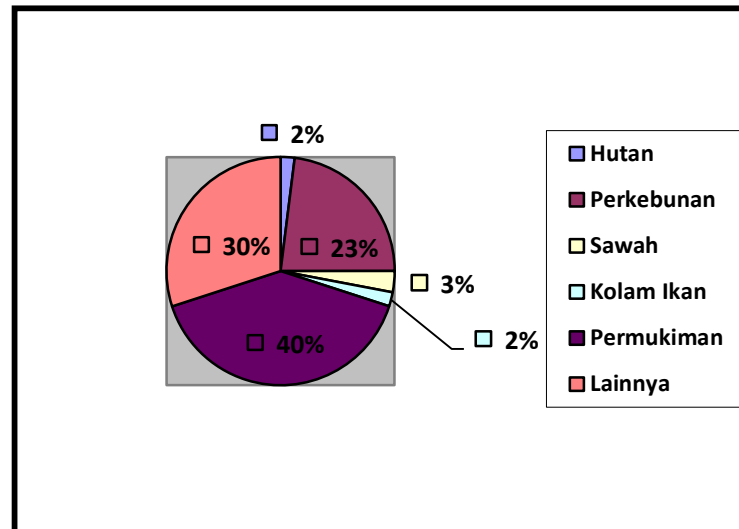
Kabupaten Jayawijaya secara geografis terletak di jantung Pulau Papua dengan sebutan **Lembah Agung**. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk Pertanian / perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian. Topografi wilayah Kabupaten Jayawijaya pada umumnya merupakan pegunungan dan bagian tengah merupakan lembah. Tingkat kemiringan rata - rata lereng yang bervariasi 8 - 15° seluas 51 persen, 25 - 40° seluas 29 persen, lebih dari 60° seluas 20 persen dan berada pada ketinggian 1.550 dari permukaan laut, dengan rata - rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya, yang cukup memadai untuk ketersediaan budidaya pertanian.

Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten dengan luas wilayah 8.469 km². Wilayah Kabupaten Jayawijaya sebagian besar masih merupakan daerah kawasan hutan, karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan - kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 168.025,9 ha atau sekitar 2 persen; daerah persawahan sekitar 308 ha atau 3 persen dan perkebunan dengan luas sekitar 1.976 ha atau 23 persen; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai 40 persen. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Jayawijaya dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain - lainnya.

Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Jayawijaya berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Papua. Disamping potensi dibidang pertanian, Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah produksi tanaman perkebunan, serta memiliki

potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat.

Gambar 1.1
Luas Kabupaten Jayawijaya
Dibedakan Menurut Penggunaannya



Sumber : Data Olah Bappeda Jayawijaya 2018

Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Jayawijaya terletak antara 138.30° - 139-40° BT dan 3.45° - 4.20° LS dengan ketinggian 1.650 di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan ibukota Wamena memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Yalimo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Yalimo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Yahukimo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara dan Mamberamo Tengah.

[illegible]

Tabel 1.1
Jumlah Distrik, Kampung dan Kelurahan
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

No.	Nama Distrik	Km ²	%	Kampung/ Kelurahan
1	2	3	4	5
1	Wamena	110,85	1,30	11
2	Asologaima	156,97	1,85	9
3	Kurulu	187,62	2,21	12
4	Musatfak	189,43	2,23	10
5	Asolokobal	187,99	2,21	9
6	Walelagama	147,74	1,74	6
7	Hubikosi	105,97	1,25	12
8	Pelebaga	190,95	2,25	13
9	Bolakme	339,87	4,01	12
10	Yalengga	105,58	1,24	11
11	Wollo	157,6	1,86	8
12	Trikora	876,25	10,34	6
13	Napua	150,24	1,77	9
14	Walaik	258,03	3,04	5
15	Wouma	48,75	0,57	7
16	Silo karno dogo	191,54	2,26	8
17	Pyramid	150	1,77	10

18	Muliama	363,27	4,28	12
19	Usilimo	203,42	2,40	10
20	Wita Waya	149,94	1,77	5
21	Libarek	157,27	1,85	5
22	Wadangku	300,02	3,54	5
23	Pisugi	109,41	1,29	7
24	Walesi	366,93	4,33	7
25	Asotipo	243,27	2,87	10
26	Maima	379,54	4,48	7
27	Itlayhisage	322,16	3,80	9
28	Siepkosi	384,41	4,53	9
29	Hubikiak	158,67	1,87	7
30	Ibele	203,71	2,40	10
31	Tailarek	306,01	3,61	8
32	Tagime	141,95	1,67	11
33	Molagalome	104,59	1,23	6
34	Tagineri	141,98	1,67	9
35	Koragi	50,18	0,59	5
36	Bugi	102,22	12,06	8
37	Bpiri	194,39	2,29	7
38	Wesaput	56,31	0,66	9
39	Wame	144,51	1,70	5
40	Popugoba	356,31	4,20	4
JUMLAH		8.469	100	328 Kampung/ 4 Kelurahan

Sumber : Dokumen RT/RW Kab. Jayawijaya, 2013

1.2.2 Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah – masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2018 mencapai **271.341** jiwa.

Tingkat Kepadatan Penduduk rata – rata 31,58 Orang / Km² dari luas wilayah sebesar **8.469** km².

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki – laki		Perempuan		Total (L + P)	
	(Jiwa)	%	(Jiwa)	%	(Jiwa)	%
1	2	3	4	5	6	7
0-4	4.239	2,97	3.857	3,00	8.096	2,98
5-9	9.797	6,87	8.563	6,65	18.360	6,77
10-14	12.345	8,66	10.881	8,45	23.226	8,56
15-19	16.450	11,54	14.207	11,03	30.657	11,30
20-24	18.095	12,69	14.521	11,28	32.616	12,02
25-29	16.088	11,28	13.346	10,37	29.434	10,85
30-34	12.949	9,08	11.136	8,65	24.085	8,88
35-39	10.638	7,46	11.814	9,18	22.448	8,27
40-44	9.669	6,78	11.216	8,71	20.885	7,70
45-49	9.866	6,92	10.565	8,21	20.431	7,53
50-54	7.918	5,55	7.948	6,17	15.866	5,85
55-59	7.193	5,04	5.875	4,56	13.068	4,82
60-64	3.523	2,47	2.406	1,87	5.929	2,19
65-69	2.319	1,63	1.495	1,16	3.814	1,41
70-74	763	0,54	508	0,39	1.271	0,47
>75	738	0,52	417	0,32	1.155	0,43
JUMLAH	142.586	100	128.755	100	271.341	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2018.

Penduduk Kabupaten Jayawijaya sebagian besar bermata pencaharian **Bidang Pertanian** yang mendominasi keseluruhan jumlah penduduk yaitu mencapai **168.449** jiwa atau **62** persen dari Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 sebesar **271.341** jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan **Tingkat SD / Sederajat** yaitu sebesar **569.111** atau **33,60** persen dari jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 sebesar **271.341** jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	2	3	4
1.	Belum / Tidak Sekolah	172.270	63
2.	Belum Tamat SD / Sederajat	23.515	9
3.	SD / Sederajat	18.306	8
4.	SLTP / Sederajat	16.116	7
5.	SLTA / Sederajat	31.167	11
6.	Diploma I / II	1.310	0
7.	Akademi / Diploma III / S.Muda	2.022	0
7.	Diploma IV / Strata I	6.239	2
8.	Strata II	304	0
9.	Strata III	93	0
	Jumlah	271.341	100.00

Sumber Diolah : Bappeda Kabupaten Jayawijaya 2018

1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Melambatnya perekonomian nasional, Kabupaten Jayawijaya tetap optimis dengan laju positif perekonomian daerah. Dalam APBD 2018, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 berada pada posisi 6,10%. Berdasarkan kerangka ekonomi makro yang telah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, APBD tahun 2018 disusun sebagai upaya pemerintah melakukan berbagai langkah, antara lain mendorong ekonomi dan meningkatkan gerak dan transaksi ekonomi. Oleh karena itu seluruh proyeksi baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan diharapkan dapat secara efektif menstimulasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya. Untuk mencapai sasaran pembangunan dan kapasitas fiskal yang semakin kuat, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan, menggali mengembangkan sumber – sumber pendapatan asli daerah secara menyeluruh dan profesional.

Belanja daerah tahun anggaran 2018 dilaksanakan dan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak pada kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi

penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga penggunaannya harus mengedepankan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan prioritas. Dari keseluruhan program pembangunan, sektor ekonomi menjadi fokus utama yang digenjot pertumbuhannya, sebab sektor ini berkaitan langsung dengan upaya mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan ekonomi warga akan menjadi pondasi kuat dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya mengalami fluktuasi karena tidak semua sektor perekonomian daerah bergerak. Bersama – sama, mulai pertanian, perikanan, UMKM, sektor barang dan jasa hingga pariwisata. Selain itu Pemerintah daerah maupun swasta turut serta menggeliatkan perekonomian daerah. Masing – masing memiliki peran penting mendorong semua sektor perekonomian. Tugas Pemerintah daerah menjadi trigger bagi perkembangan daerah dan mengejawantahkan lewat kebijakan sehingga mampu memicu sektor perekonomian warga. Karena itu dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jayawijaya selalu berada pada tren positif walau mengalami fluktuasi.

Dalam meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten juga terus mendorong program afirmasi untuk memastikan seluruh rakyat Jayawijaya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pelosok kampung mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan, maka diperkirakan stabilitas ekonomi di Kabupaten Jayawijaya dalam tahun 2018 tetap terjaga dan diharapkan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menumbuhkan sektor modern seperti jasa dan manufaktur, namun tetap harus dipastikan pertumbuhan juga terjadi di sektor – sektor menengah ke bawah, sehingga ekonomi kerakyatan dapat terwujud. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah merumuskan enam kebijakan utama yang terdiri atas peningkatan belanja infrastruktur, meningkatkan efisiensi belanja daerah, memantapkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik, pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah melalui pemerataan pembangunan, mendukung efektivitas dan perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

1.4 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang energi sumber daya mineral;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 15. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 16. Dinas Olah Raga dan Pemuda Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 19. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 20. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;

3. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bencana.
- f. Kecamatan / Distrik, terdiri dari :
1. Distrik Wamena dengan Tipe A;
 2. Distrik Asologaima dengan Tipe A;
 3. Distrik Kurulu dengan Tipe A;
 4. Distrik Hubikosi dengan Tipe A;
 5. Distrik Bolakme dengan Tipe A;
 6. Distrik Walelagama dengan Tipe A;
 7. Distrik Musatfak dengan Tipe A;
 8. Distrik Wollo dengan Tipe A;
 9. Distrik asolokobal dengan Tipe A;
 10. Distrik Pelebaga dengan Tipe A;
 11. Distrik Yalengga dengan Tipe A;
 12. Distrik Trikora dengan Tipe A;
 13. Distrik Napua dengan Tipe A;
 14. Distrik Walaik dengan Tipe A;
 15. Distrik Wouma dengan Tipe A;
 16. Distrik Hubikiak dengan Tipe A;
 17. Distrik Ibele dengan Tipe A;
 18. Distrik Tailarek dengan Tipe A;
 19. Distrik Itlay Hisage dengan Tipe A;
 20. Distrik Siepkosi dengan Tipe A;
 21. Distrik Usilimo dengan Tipe A;
 22. Distrik Wita Waya dengan Tipe A;
 23. Distrik Libarek dengan Tipe A;
 24. Distrik Wadangku dengan Tipe A;
 25. Distrik Pisugi dengan Tipe A;
 26. Distrik Koragi dengan Tipe A;
 27. Distrik Tagime dengan Tipe A;
 28. Distrik Molagalome dengan Tipe A;
 29. Distrik Tagineri dengan Tipe A;
 30. Distrik Silokarnodoga dengan Tipe A;

31. Distrik Pyramid dengan Tipe A;
32. Distrik Muliama dengan Tipe A;
33. Distrik Bugi dengan Tipe A;
34. Distrik Bpiri dengan Tipe A;
35. Distrik Walesi dengan Tipe A;
36. Distrik Asotipo dengan Tipe A;
37. Distrik Maima dengan Tipe A;
38. Distrik Popugoba dengan Tipe A;
39. Distrik Wame dengan Tipe A;
40. Distrik Wesaput dengan Tipe A;

Selain Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih ditetapkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, sambil menunggu peraturan perundang – undangan yang berlaku / mengatur Urusan Pemerintahan Umum dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Jayawijaya. Begitu juga Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Tabel 1.4
Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Keterangan
1	2	3
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2	Kesehatan	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	-
6	Sosial	-
No	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Keterangan
1	Tenaga Kerja	-

2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
3	Pangan	-
4	Pertanahan	-
5	Lingkungan Hidup	-
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
9	Perhubungan	-
10	Komunikasi dan Informatika	-
11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	-
12	Penanaman Modal	-
13	Kepemudahaan dan Olah Raga	-
14	Statistik	-
15	Persandian	-
16	Kebudayaan	-
17	Perpustakaan	-
18	Kearsipan	-
No	Urusan Pilihan	Keterangan
1	Kelautan dan Perikanan	Perikanan
2	Pariwisata	-
3	Pertanian	-
4	Perdagangan	-
5	Perindustrian	-
6	Kehutanan	Pengelolaan Kebun Raya Biologi Wamena / Kabupaten
7	Energi dan Sumber Daya Meneral	-

Sumber : Data Diolah

1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data **Simpeg Tahun 2018** sebanyak **3.377** orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak **1.837** orang dan perempuan sebanyak **1.540** orang.

Tabel 1.5
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
Berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		Laki – Laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1	SD	67	23	90
2	SMP / SLTP	96	69	165
3	SMA / SLTA	390	188	578
4	D I	38	30	68
4	D II	42	73	115
5	D III	270	335	605
6	D IV / S 1	825	727	1.552
7	S 2	108	95	203
8	S 3	1	0	1
Jumlah		1.837	1.540	3.377

Sumber: BKD & PSDM Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi gambaran umum Kabupaten, aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Berisi ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis dan perjanjian kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Berisi:

- Capaian Kinerja Kabupaten
- Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

Lampiran



BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2013 – 2018

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMDD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Jayawijaya dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun, pasangan **JHON WEMPI WETIPO (BUPATI) – JHON RICHARD BANUA (WAKIL BUPATI)** membuat Visi Kabupaten Jayawijaya tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

“JAYAWIJAYA YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA, MANDIRI DAN SEJAHTERA ”.

Penjelasan dari Visi sebagai berikut :

1. **Berkualitas** dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual (*intelligentsia Question*), emosional (*emotional Question*), dan spiritual (*spiritual Question*) serta sehat jasmani dan rohani.
2. **Berbudaya** dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma-norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta.
3. **Mandiri** dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan berkembang di atas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing.
4. **Sejahtera**, dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi pasangan **JHON WEMPI WETIPO (BUPATI) – JHON RICHARD BANUA (WAKIL BUPATI)** ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan perlindungan nilai – nilai budaya dan hak – hak dasar masyarakat Jayawijaya;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal;
5. Meningkatkan infrastruktur daerah.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi ditetapkan 13 (tiga belas) tujuan, yaitu sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah.
 - ✓ Jumlah PNS yang bergelar S1
 - ✓ Prosentase aparatur yang telah mengikuti diklat structural/ kempemimpinan dan lulus
 - ✓ Prosentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis
 - ✓ Prosentase implementasi penempatan sesuai persyaratan kompetensi
2. Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah.
 - ✓ Prosentase usulan masyarakat melalui musrembang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah
 - ✓ Tingkat integrasi data SKPD ke dalam Jayawijaya satu data
3. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, akuntabel dan transparansi.
 - ✓ Nilai evaluasi AKIP
 - ✓ Cakupan wilayah untuk Pelayanan informasi pembangunan
 - ✓ Tingkat layanan interaksi pengaduan
4. Meningkatnya pelayanan public kepada masyarakat.
 - ✓ Prosentase pencapaian target SPM
 - ✓ Prosentase capaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Meningkatnya penanggulangan bencana alam.
 - ✓ Cakupan Penanganan bencana alam
 - ✓ Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan
 - ✓ Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
 - ✓ Indeks Pendidikan

- ✓ Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara)
- 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 - ✓ Angka kematian ibu melahirkan
 - ✓ Angka kematian bayi
 - ✓ Angka kematian balita
 - ✓ Persentase penyakit menular yang ditangani
 - ✓ Persentase penanggulangan kejadian luar biasa
 - ✓ Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
 - ✓ Persentase Puskesmas yang melaksanakan Standar Pelayanan
- 3. Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan
 - ✓ Rasio Jumlah Pengangguran terhadap angkatan kerja
 - ✓ Lapangan pekerjaan baru
 - ✓ IPM

Tujuan 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olahraga

- ✓ Prestasi Olah Raga di tingkat Prov dan Nasional

Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social

Sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan sosial

- ✓ Tingkat Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan social
- ✓ Jumlah sarana social (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)

Tujuan 5 Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, toleransi dan bermartabat

Sasaran :

- 1. Meningkatnya kehidupan harmoni inter dan antar kelompok masyarakat
 - ✓ Tingkat konflik inter dan antar kelompok masyarakat

- ✓ Cakupan rasio petugas Linmas
- ✓ Cakupan patroli siaga ketertiban dan ketentraman
- 2. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
 - ✓ Cakupan penegakan perda, Perkada yang ditangani dengan yang dilaporkan
- 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
 - ✓ Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

Tujuan 6 Meningkatkan pelestarian budaya

Sasaran :

Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya sebagai asset masyarakat

- ✓ Prosentase Seni Budaya Jayawijaya yang dilestarikan

Tujuan 7 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
 - ✓ Indeks pembangunan gender (IPG)
 - ✓ Kabupaten Layak Anak
 - ✓ Produktifitas bahan pangan utama
 - ✓ Produktifitas hasil perikanan
 - ✓ Produktifitas hasil peternakan
 - ✓ Score Pola Pangan Harapan (PPH)
2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
 - ✓ Prosentase Perempuan yang menjadi anggota dewan

Tujuan 8 Meningkatkan perekonomian daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
 - ✓ Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
2. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas koperasi dan UMKM
 - ✓ Koperasi aktif
 - ✓ Jumlah produksi industri kecil dan menengah (Ribu)

Tujuan 9 Meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan Gizi

Sasaran :

1. Meningkatnya pengembangan pariwisata
 - ✓ Jumlah Kunjungan wisatawan
2. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian

Tujuan 10 Meningkatkan infrastruktur dasar pelayanan publik

Sasaran :

1. Meningkatnya Infrastruktur jalan, jembatan yang berkualitas, dan merata
 - ✓ Rasio Luas Jalan dan jembatan dalam Kondisi Baik
2. Meningkatnya infrastruktur drainase perkotaan
 - ✓ Rasio drainase dalam kondisi baik
3. Meningkatnya Pemukiman Layak huni
 - ✓ Persentase rumah layak huni
4. Meningkatnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata
 - ✓ Tingkat cakupan pelayanan air bersih

Tujuan 11 Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah

Sasaran :

Meningkatnya sistem transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi public yang nyaman

- ✓ Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana transportasi

Tujuan 12 Meningkatkan kota Wamena yang bersih

Sasaran :

Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sampah yang bersih dan berkelanjutan

- ✓ Persentase sarana dan prasarana sampah perkotaan

Tujuan 13 Mengoptimalkan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sasaran :

Terlaksana optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup

- ✓ Luas kerusakan hutan yang direhabilitasi
- ✓ Luas kerusakan daerah aliran sungai yang direhabilitasi
- ✓ Persentase penanganan sampah
- ✓ Luas lahan kritis yang direhabilitasi
- ✓ Luas alih fungsi lahan pertanian

Tabel 2.1.
Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Jayawijaya

Visi		Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera							
Misi		Tujuan			Sasaran Strategis				
		Uraian		Indikator Kinerja	Uraian		Indikator Kinerja		
1		2		3	4		5		
1	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik	1	Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah	▪ Jumlah PNS yang bergelar S1 ▪ Prosentase aparatur yang telah mengikuti diklat structural/ kempemimpinan dan lulus ▪ Prosentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis ▪ Prosentase implementasi penempatan sesuai persyaratan kompetensi	1	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah	1	▪ Jumlah PNS yang bergelar S1 ▪ Prosentase aparatur yang telah mengikuti diklat structural/ kempemimpinan dan lulus ▪ Prosentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis ▪ Prosentase implementasi penempatan sesuai persyaratan kompetensi	
					2	Meningkatnya konsistensi perencanaan pemangunan daerah	2	▪ Prosentase usulan masyarakat melalui musrembang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah ▪ Tingkat integrasi data SKPD ke dalam Jayawijaya satu data	
					3	Meningkatnya pelayanan public kepada masyarakat	3	▪ Prosentase pencapaian target SPM ▪ Prosentase capaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
					4	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, akuntabel dan transparansi	4	▪ Nilai evaluasi AKIP ▪ Cakupan wilayah untuk Pelayanan informasi pembangunan ▪ Tingkat layanan interaksi pengaduan	

					5	Meningkatnya penanggulangan bencana alam	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cakupan Penanganan bencana alam ▪ Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jayawijaya	2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		6	Meningkatnya kualitas pendidikan	6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) ▪ Indeks Pendidikan ▪ Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
					7	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angka kematian ibu melahirkan ▪ Angka kematian bayi ▪ Angka kematian balita ▪ Persentase penyakit menular yang ditangani ▪ Persentase penanggulangan kejadian luar biasa ▪ Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ▪ Persentase Puskesmas yang melaksanakan Standar Pelayanan
					8	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan	8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Jumlah Pengangguran terhadap angkatan kerja ▪ Lapangan pekerjaan baru ▪ IPM
		3	Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi oleh raga		9	Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olahraga	9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestasi Olah Raga di tingkat Prov dan Nasional
3	Meningkatkan perlindungan nilai-nilai budaya dan hak-hak dasar masyarakat Jayawijaya	4	Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social		10	Meningkatnya kualitas pelayanan social	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan social ▪ Jumlah sarana social (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)
		5	Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang		11	Meningkatnya kehidupan harmoni inter dan antar	11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat konflik inter dan antar kelompok masyarakat

			harmonis, damai, toleransi dan bermartabat			kelompok masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cakupan rasio petugas Linmas ▪ Cakupan patroli siaga ketertiban dan ketentraman
					12	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum	12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cakupan penegakan perda, Perkada yang ditangani dengan yang dilaporkan
					13	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik	13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
		6	Meningkatkan pelestarian budaya		14	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya sebagai asset masyarakat	14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosentase Seni Budaya Jayawijaya yang dilestarikan
		7	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak		15	Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak	15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks pembangunan gender (IPG) ▪ Kabupaten Layak Anak
					16	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosentase Perempuan yang menjadi anggota dewan
4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi local	8	Meningkatkan perekonomian daerah		17	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

					18	Meningkatnya kapasitas dan produktifitas koperasi dan UMKM	18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koperasi aktif ▪ Jumlah produksi industry kecil dan menengah (Ribu)
		9	Meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan Gizi		19	Meningkatnya pengembangan pariwisata	19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Kunjungan wisatawan
					20	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktifitas bahan pangan utama ▪ Produktifitas hasil perikanan ▪ Produktifitas hasil peternakan ▪ Score Pola Pangan Harapan (PPH)
5	Meningkatkan infrastruktur daerah	10	Meningkatkan infrastruktur dasar pelayanan publik		21	Meningkatnya Infrastruktur jalan, jembatan yang berkualitas, dan merata	21	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Luas Jalan dan jembatan dalam Kondisi Baik
					22	Meningkatnya infrastruktur drainase perkotaan	22	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio drainase dalam kondisi baik
					23	Meningkatnya Pemukiman Layak huni	23	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase rumah layak huni
					24	Meningkatnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	24	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat cakupan pelayanan air bersih
		11	Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman,		25	Meningkatnya sistem transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan	25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana transportasi

			efisien, memadai, handal dan ramah			transportasi public yang nyaman		
		12	Meningkatkan kota Wamena yang bersih		26	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sampah yang bersih dan berkelanjutan	26	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase sarana dan prasarana sampah perkotaan
		13	Mengoptimalkan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		27	Terlaksanya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup	27	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kerusakan hutan yang direhabilitasi ▪ Luas kerusakan daerah aliran sungai yang direhabilitasi ▪ Persentase penanganan sampah ▪ Luas lahan kritis yang direhabilitasi ▪ Luas alih fungsi lahan pertanian

2.1.4 Kebijakan dan Program

Kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan pencapaian Misi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Gambar berikut ini adalah skema arah kebijakan yang telah ditetapkan:

Tema dan Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	
	Prioritas karena wajib dengan sendirinya	Prioritas pendukung strategi pembangunan
1	2	3
Tahun 2016 MENINGKATKAN KUALITAS SDM, PALAYANAN DASAR, INFRASTRUKTUR DAERAH, PERLINDUNGAN BUDAYA DAN HAK DASAR MASYARAKAT JAYWIJAYA, MENINGKATKAN KEPARIWISATAAN, IPTEK DAN DAYA SAING DAERAH	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pelayanan Umum d. Urusan Pemerintahan	1) Meningkatkan kualitas SDM dan Reformasi Birokrasi; 2) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan dasar; 3) Meningkatkan Infrastruktur Daerah; 4) Meningkatkan perlindungan budaya dan hak dasar masyarakat Jayawijaya; 5) Meningkatkan kepariwisataan 6) Meningkatkan IPTEK dan daya saing daerah.
Tahun 2017 MENINGKATKAN KUALITAS SDM, PELAYANAN DASAR, INFRASTRUKTUR DAERAH, MENDAYAGUNAKAN SDA DAN IPTEK, MENGEMBANGKAN KEPARIWISATAAN DAN MENDORONG DAYA SAING	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pelayanan Umum d. Urusan Pemerintahan	1. Peningkatan kualitas sdm; 2. Peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan) 3. Peningkatan infrastruktur daerah 4. Pendayagunaan sda dan iptek 5. Pengembangan budaya & kepariwisataan yg berdaya saing dan berbasis kearifan lokal

Teman dan Priotas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	
	Prioritas karena wajib dengan sendirinya	Prioritas pendukung staregi pembangunan
1	2	3
DAERAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL		
Tahun 2018 MEWUJUDKAN SDM BERKUALITAS, DAN PENERAPAN IPTEK YANG UNGGUL, PELAYANAN DASAR, INFRASTRUKTUR DAERAH PROMOSI KEPARIWISATAAN, INVESTASI DAERAH, PENGEMBANGAN EKONOMI LOCAL DAN PENGELOLAAN SDA DALAM RANGKA MENCAPAI DAYA SAING DAERAH	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pelayanan Umum d. Urusan Pemerintahan	1. Mewujudkan sdm yg berkualitas & penerapan iptek ; 2. Mewujudkan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan) 3. Mewujudkan infrastruktur daerah 4. Mewujudkan promosi pariwisata & investasi daerah 5. Mewujudkan pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan sda dlm mencapai daya saing daerah
Tahun 2019 PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PRODUKTIVITAS SERTA DAYA SAING EKONOMI DAERAH YANG PRO RAKYAT, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pelayanan Umum d. Urusan Pemerintahan	1. Pemantapan pembangunan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur 2. Peningkatan reformasi birokrasi dan pembangunan berbasis iptek 3. Memperkuat basis daerah sebagai obyek wisata budaya dan alam, dan menjadikan sector pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah dan masyarakat 4. Memperkuat pembangunan ekonomi rakyat

Teman dan Priotas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	
	Prioritas karena wajib dengan sendirinya	Prioritas pendukung staregi pembangunan
1	2	3
		5. Peningkatan pembangunan yang berorientasi pada penanaman modal daerah
Tahun 2020 SINERGI PROGRAM STAKEHOLDER UNTUK PENINGKATAN EKONOMI DIDUKUNG PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pelayanan Umum d. Urusan Pemerintahan	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal yang mendukung pengembangan jasa dan pariwisata, infrastruktur berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 4. Pelayanan perlindungan dan pemberdayaan sosial, ketertiban umum dan linmas

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Pertimbangan pokok adalah ketersediaan anggaran, kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah

Daerah, agar menjamin kepastian pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan. Mengingat pula bahwa Pemerintah Daerah, mempunyai keterbatasan dalam pengalokasian sumber daya, maka ditetapkan indikator pokok/utama, yang berdaya ungkit besar, menggerakkan seluruh komponen lainnya dalam system pembangunan yang integrative dan koordinatif. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor: 06.1 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah	1	Prosentase aparatur daerah yang berpendidikan S1, S2 dan S3
		2	Meningkatnya konsistensi perencanaan pemangunan daerah	2	Prosentase tersedianya informasi RTRW serta rencana riciannya melalui peta analog dan peta digital
		3	Meningkatnya pelayanan public kepada masyarakat	3	Presntase kepemilikan KTP
		4	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, akuntabel dan transparansi	4	Nilai Evaluasi SAKIP Opini BPK Presentase tingkat capaian IKU Daerah Jumlah Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	5	Meningkatnya kualitas pendidikan	5	Prosentase angka melek huruf Angka rata – rata lama sekolah
		6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	6	Usia Harapan Hidup Prosentase balita dengan gizi buruk Prosentase cakupan pelayanan kesehatan

					IPM
		7	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan	7	Angka partisipasi angkatan kerja
3	Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social	8	Meningkatnya kualitas pelayanan social	8	Prosentase KK Miskin
		9	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	9	IPG
4	Meningkatkan perekonomian daerah	10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	10	PDRB Per kapita Pertumbuhan PDRB Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD
5	Meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan Gizi	11	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	11	Produksi dan produktivitas pangan utama dan lokal
6	Meningkatkan infrastruktur dasar pelayanan publik	12	Meningkatnya Infrastruktur jalan, jembatan yang berkualitas, dan merata	12	Prosentase proporsi panjang jalan dan jembatan baik
		13	Meningkatnya Pemukiman Layak huni	13	Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni
7	Mengoptimalkan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	14	Terlaksana optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup	14	Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1		
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Prosentase aparatur daerah yang berpendidikan S1, S2 dan S3	%	50
Sasaran Strategis 2		
Meningkatnya konsistensi perencanaan pemangunan daerah		
Prosentase tersedianya informasi RTRW serta rencana riciannya melalui peta analog dan peta digital	%	60
Sasaran Strategis 3		
Meningkatnya pelayanan public kepada masyarakat		
Presntase kepemilikan KTP	%	32
Sasaran Strategis 4		

Meningkatnya efektifitas, efesiensi, akuntabel dan transparansi		
Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	60 (CC)
Opini BPK	Opini	WTP
Presentase tingkat capaian IKU Daerah	%	80
Jumlah Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD	Produk / Buah	6
Sasaran Strategis 5		
Meningkatnya kualitas pendidikan		
Prosentase angka melek huruf	%	54,63
Angka rata – rata lama sekolah	Tahun	4,63
Sasaran Strategis 6		
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		
Usia Harapan Hidup	Tahun	66,92
Prosentase balita dengan gizi buruk	%	0,02
Prosentase cakupan pelayanan kesehatan	%	55
IPM	Tahun	59,17
Sasaran Strategis 7		
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan		
Angka partisipasi angkatan kerja	%	31,01
Sasaran Strategis 8		
Meningkatnya kualitas pelayanan social		
Prosentase KK Miskin	%	31,11
Sasaran Strategis 9		
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak		
Indeks Pembangunan Gender	%	89,65
Sasaran Strategis 10		

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		
PDRB Per kapita	Rp. (Ribu)	2.102
Pertumbuhan PDRB	%	6,45
Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD	%	5
Sasaran Strategis 11		
Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian		
Produksi dan produktivitas pangan utama dan lokal	Ton	182,316
Sasaran Strategis 12		
Meningkatnya Infrastruktur jalan, jembatan yang berkualitas, dan merata		
Prosentase proporsi panjang jalan dan jembatan baik	%	7,50
Sasaran Strategis 13		
Meningkatnya Pemukiman Layak huni		
Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	9,54
Sasaran Strategis 14		
Terlaksana optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup		
Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	28,12

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. **1.608.469.681.059,70**



3.1 capaian kinerja

Kebijakan pembangunan daerah pada prinsipnya diimplementasikan dalam sejumlah program strategis daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja pada setiap aspek pembangunan, maka dilakukan penilaian terhadap realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam kelompok Indikator Kinerja Utama. Mengingat pula bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan sebuah sistem yang melibatkan seluruh perangkat daerah maka penilaian capaian kinerja kegiatan dan program pembangunan yang dilaksanakan pada setiap OPD dianggap sebagai capaian kinerja program daerah. Sedangkan capaian kinerja kebijakan, dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), diperoleh dengan cara membandingkan target capaian dengan rata-rata realisasi capaian pada setiap program dalam kelompok kebijakan/IKU. Selanjutnya capaian kinerja dilaporkan melalui media penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan Pemerintah Daerah dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala	Kategori				
86 s/d 100	Baik		Sangat baik		Sangat berhasil
70 s/d 85	Sedang	Atau	Baik	atau	Berhasil
55 s/d 69	Kurang		Sedang		Cukup berhasil
Kurang dari 55	Sangat kurang		Kurang baik		Tidak berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2018 terhadap 14 IKU yang telah ditetapkan maka diperoleh hasil sebagaimana tersaji dalam table 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET. CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya aparatur	Presentase aparatur daerah yang berpendidikan S1, S2 dan S3	50 %	51,99 %	103,98 %	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan	Presentase tersedianya informasi RTRW serta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital	60 %	65 %	108,33 %	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat	Persentase kepemilikan KTP	32 %	25,71 %	80,34 %	Berhasil
4.	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparansi	Nilai evaluasi SAKIP	CC (60)	C (42,45)	70,75 %	Berhasil
		Opini BPK	WTP	WTP	100 %	Sangat Berhasil
		Persentase tingkat capaian IKU daerah	80%	86,43%	104,04%	Sangat Berhasil
		Jumlah Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD	6	5	83,33%	Berhasil
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Presentase angka melek huruf	54,63%	74,20** %	135,82 %	Sangat Berhasil
		Angka rata-rata lama sekolah	4,63 Tahun	4,99** Tahun	107,77 %	Sangat Berhasil
6.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Usia harapan hidup	66,92 Tahun	58,67** Tahun	87,67 %	Sangat Berhasil
		Persentase Balita dengan gizi buruk	0,02%	8,37%	-41,65 %	Kurang berhasil
		Presentase cakupan pelayanan kesehatan	55 %	35,8%	69,09 %	Cukup Berhasil

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET. CAPAIAN
		IPM	59,17	55,99**	94,63 %	Sangat Berhasil
7.	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan	Angka partisipasi angkatan kerja	31.01	88,79	286,33 %	Sangat Berhasil
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial	Persentase KK Miskin	31,11 %	6,81 %	21,89%	Tidak Berhasil
9.	Meningkatnya pelayanan perempuan terhadap anak	Indeks Pembangunan Gender	89,65 %	69,65 %	77,69 %	Berhasil
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB Perkapita (per bulan dalam jutaan)	2.102	2.6464**	126,74 %	Sangat Berhasil
		Pertumbuhan PDRB	6,45 %	5,52 %	85,58 %	Sangat Berhasil
		Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	5 %	6,71 %	134,2 %	Sangat Berhasil
11.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	Produksi dan produktivitas pangan utama local	182,316 Ton	131,55 Ton	72,15 %	Berhasil
12.	Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan yang berkualitas dan merata	Persentase proporsi panjang jalan dan jembatan baik	7,50 %	5,06 %	67,47 %	Cukup Berhasil
13.	Meningkatnya pemukiman layak huni	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	9,54 %	9,82%	102,93 %	Berhasil
14.	Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan	Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan kritis	20,91 %	13,25%	63,37%	Cukup Berhasil

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET. CAPAIAN
	pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup					

3.2 Akuntabilitas Kinerja

Hasil pengukuran seluruh capaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2018 diuraikan dalam analisis capaian kinerja per misi sebagai berikut:

MISI I

Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase aparatur daerah yang berpendidikan S1, S2 dan S3	30%	45%	50%	50,59 %	50%	51,99 %	103,98	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas menunjukkan upaya pemerintah daerah mendorong peningkatan jumlah aparatur yang berpendidikan S1, S2 dan S3 pada tahun 2018, telah mencapai target yang direncanakan sebesar 51,99 persen dari target 50 persen. Pencapaian ini dapat terealisasi, atas keberhasilan studi sebagian aparatur yang melaksanakan tugas belajar pada tahun sebelumnya. Selain itu pula, didukung oleh keberhasilan studi para aparatur daderah yang melaksanakan ijin belajar (mandiri) pada perguruan tinggi di kota Wamena. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2018 termasuk dalam kategori SANGAT BERHASIL

Apabila dilihat dari target periode RPJMD Kabupaten Jayawijaya 2013 – 2018, maka terdapat kenaikan sebesar 77,01 persen, atau dari sebelumnya pada tahun 2014 terdapat sejumlah 992 orang pegawai yang berpendidikan S-1, S-2 dan S-3, meningkat menjadi sejumlah 1.756 orang pegawai pada akhir tahun 2018. Demikian pula realisasi capaian kinerja selama lima tahun pelaksanaan RPJMD, mengalami kenaikan yang positif, pada setiap tahunnya, yang menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah, memperbaiki kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan formal.

Dari sisi pembangunan gender, telah menunjukkan semakin meningkatnya jumlah pegawai perempuan, yang mencapai pendidikan formal sarjana, apabila dibandingkan pada awal pelaksanaan RPJMD daerah.

Komposisi nominative pegawai pada akhir tahun 2018, sesuai tingkat pendidikan, disajikan dalam table di bawah ini

Tabel 3.3
Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018
menurut tingkat pendidikan

TK. PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	Total
SD	67	23	90
SLTP	96	69	165
SLTA	390	188	578
D-I	38	30	68
D-II	42	73	115
D-III	270	335	605
D-IV/S1	825	727	1.552
S2	108	95	203
S3	1	0	1
Total	1.837	1.540	3.377

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

Peningkatan jumlah pegawai yang berpredikat S1, S2 dan S3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH				
	2014	2015	2016	2017	2018
SD	135	59	108	161	90
SLTP	785	175	194	293	165
SLTA	771	389	735	475	578
D-I		57	96		68
D-II	31	193	120	70	115
D-III	665	998	674	962	605
D-IV/S1	946	1.467	1.713	1.532	1.552
S2	45	75	185	198	203
S3	1	1	1	1	1
Total	3.379	3.414	3.826	3.692	3.377

*Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018*

Dengan semakin meningkatnya rata-rata pendidikan formal para pegawai di lingkungan pemerintah daerah, dapat diyakini akan meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sasaran meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase tersedianya informasi RTRW serta rinciannya melalui peta analog dan peta digital		35%	35%	45%	60%	65%	108,33%	Sangat berhasil

Rencana Tata Ruang Wilayah Bersifat arahan kebijakan umum tentang penataan ruang dalam lingkup wilayah yang berisi Struktur ruang meliputi sistem kegiatan perkotaan dan jaringan transportasi serta jaringan pendukungnya (sistem jaringan dan Pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Saat ini Kabupaten Jayawijaya telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah dengan skala 1

: 150.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya tahun 2013-2033.

Berdasarkan ketentuan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang. Rencana Detail Tata Ruang berisi arah strategis penataan ruang kota, berisi Struktur pemanfaatan ruang, yang meliputi distribusi penduduk, struktur pelayanan kegiatan kawasan Perkotaan, sistem jaringan pergerakan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan energi, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan dan Pola pemanfaatan ruang, yang meliputi Pengembangan kawasan fungsional (kawasan Permukiman, perdagangan, jasa, pemerintahan, pariwisata, perindustrian) dalam blok-blok. Saat ini Kabupaten Jayawijaya sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Wamena. Permasalahan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jayawijaya adalah belum dimilikinya peta 1: 5000 sedangkan tingkat ketelitian peta dengan skala 1 : 5000 menjadi perhatian utama terkait informasi penataan ruang, pembagian blok penggunaan lahan / pembagian zona yang tersaji dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang juga menjadi dasar dalam izin mendirikan bangunan. Adanya Kebijakan Satu Peta No.9 Tahun 2016 menjadi acuan untuk penerbitan Peta. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah memiliki Peta 1 : 50000. Untuk mendapatkan Peta 1 : 5000 Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui BAPPEDA telah menyurat dan melakukan koordinasi serta kerja sama dengan BIG, permohonan untuk mendapatkan peta dengan skala 1 : 5000 telah ditanggapi, dan untuk sementara dalam proses pengolahan data.

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase kepemilikan KTP	6,84 %	11,00 %	15,53 %	20,17 %	32%	25,71 %	80,34%	Berhasil

Salah satu bentuk pelayanan publik yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya, sebagai indikator keberhasilan adalah meningkatnya kepemilikan e-KTP oleh penduduk Kabupaten Jayawijaya. Banyak upaya telah

dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki KTP, namun masih ditemui hambatan yang masih bersifat sosio kultur sehingga menghambat pencapaian target yang telah direncanakan.

Dari 212.644 jiwa penduduk yang wajib memiliki e-KTP pada tahun 2018, hanya dapat direalisasikan sejumlah 54.644 kepemilikan e-KTP atau sebesar 25,71 persen. Tingkat capaian ini berada di bawah target tahun 2018 sebesar 32 persen. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi tahun 2018, maka kinerja pemerintah daerah mencapai 80,34 persen dengan kriteria BERHASIL.

Pertumbuhan kepemilikan KTP oleh penduduk sesuai target RPJMD 2013-2018 juga mengalami peningkatan sebesar 235 persen. Dimana tahun 2014 hanya 16.311 jiwa pendudukan yang memiliki e-KTP, sedangkan pada tahun 2018 telah mencapai 54.664 penduduk yang memiliki e-KTP.

Faktor penyebab masih rendahnya pencapaian target tahunan, selain disebabkan oleh hambatan sosio kultural, juga disebabkan masih sulitnya akses jaringan internet sehingga peralatan perekaman tidak bisa beroperasi secara optimal. Disamping itu masih terbatasnya aparatur pegawai yang menguasai sistem aplikasi administrasi kependudukan.

Tabel 3.5
Data Wajib KTP Penduduk Kabupaten Jayawijaya
Tingkat Distrik Tahun 2018

NO	KDKEC	NAMA_KEC	LK	PR	JUMLAH PENDUDUK
1	91.02.01	WAMENA	31.012	24.168	55.180
2	91.02.03	KURULU	2.766	3.189	5.955
3	91.02.04	ASOLOGAIMA	2.104	2.102	4.206
4	91.02.12	HUBIKOSI	3.043	3.294	6.337
5	91.02.15	BOLAKME	1.995	1.812	3.807
6	91.02.25	WALELAGAMA	1.260	1.275	2.535
7	91.02.27	MUSATFAK	1.374	1.471	2.845
8	91.02.28	WOLO	4.270	3.523	7.793
9	91.02.29	ASOLOKOBAL	2.166	1.915	4.081
10	91.02.34	PELEBAGA	4.916	4.793	9.709
11	91.02.35	YALENGGA	1.594	1.426	3.020
12	91.02.40	TRIKORA	603	468	1.071
13	91.02.41	NAPUA	1.975	1.938	3.913
14	91.02.42	WALAIK	1.262	1.351	2.613
15	91.02.43	WOUMA	2.814	2.390	5.204
16	91.02.44	HUBIKIAK	5.315	4.941	10.256
17	91.02.45	IBELE	3.311	3.042	6.353
18	91.02.46	TAEAREK	1.424	1.336	2.670

NO	KDKEC	NAMA_KEC	LK	PR	JUMLAH PENDUDUK
19	91.02.47	ITLAY HISAGE	1.610	1.719	3.329
20	91.02.48	SIEPKOSI	1.458	1.454	2.912
21	91.02.49	USILIMO	1.195	1.358	2.553
22	91.02.50	WITA WAYA	719	856	1.575
23	91.02.51	LIBAREK	747	901	1.648
24	91.02.52	WADANGKU	1.231	1.044	2.275
25	91.02.53	PISUGI	1.122	1.203	2.325
26	91.02.54	KORAGI	1.294	1.128	2.422
27	91.02.55	TAGIME	2.150	1.883	4.033
28	91.02.56	MOLAGALOME	1.124	989	2.113
29	91.02.57	TAGINERI	1.282	1.056	2.238
30	91.02.58	SILOKARNODOGA	1.902	2.171	4.073
31	91.02.59	PIRAMID	2.116	1.985	4.101
32	91.02.60	MULIAMA	1.900	2.396	4.296
33	91.02.61	BUGI	1.891	1.149	3.040
34	91.02.62	BPIRI	634	586	1.220
35	91.02.63	WELESI	1.057	1.137	2.194
36	91.02.64	ASOTIPO	3.991	3.708	7.699
37	91.02.65	MAIMA	2.888	2.744	5.632
38	91.02.66	POPUGOBA	2.616	2.685	5.301
39	91.02.67	WAME	838	790	1.628
40	91.02.68	WESAPUT	4.494	3.905	8.399
JUMLAH WAJIB KTP			111.363	101.281	212.644

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

Dari data di atas, jumlah perekaman dan cetak KTP yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 3.6
Jumlah Perekaman dan Pencetakan KTP Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
1	Jumlah Perekaman KTP	4.812	8.130	8.608	10.989	13.047	45.586
2.	Jumlah Pencetakan KTP	4.571	7.910	8.265	10.200	11.978	42.924

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, 2018

Rata-rata pertumbuhan perekaman KTP sebesar 39,138 persen setiap tahunnya, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP elektronik semakin baik. Namun dari jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP baru 94,16 persen yang KTP-nya telah tercetak. Belum tercetaknya 2.662 KTP disebabkan ada

data kependudukan harus dilakukan verifikasi terkait elemen data kependudukan dan kendala teknis lainnya.

Sasaran Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparansi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai Evaluasi SAKIP	D (25,60)	C (30,74)	C (41,20)	C (42,45)	CC (60)	C** (42,45)	70,75 %	Berhasil
2	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100 %	Sangat Berhasil
3	Persentase tingkat capaian IKU daerah		50%	89,47%	54,096 %				Sangat Berhasil
4	Jumlah produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD		5 Perda	8 Perda	6 Perda	6 Perda	5 Perda	83,33%	Berhasil

Nilai Evaluasi SAKIP

Penilaian SAKIP dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat efisien dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang dikuasai dan dimiliki Pemerintah Daerah, dalam yang setahun maupun selama periode pelaksanaan RPJMD. Berdasarkan table diatas, menunjukkan dalam masa periode pelaksanaan RPJMD 2013 - 2018, nilai capaian tidak mengalami peningkatan kecuali pada awal tahun periode, yang meningkat dari predikat “D” menjadi “C”. Walaupun, belum mencapai target yang ditetapkan, capaian kinerja setiap tahun dalam empat tahun, memperlihatkan nilai capaian yang terus meningkat. Penilaian tersebut menunjukkan, masih perlunya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dikelola lebih baik lagi.

Target capaian “CC” pada tahun 2017, tidak dapat diwujudkan, dan hanya dapat dicapai predikat “C” yang menggambarkan masih lemahnya system manajemen internal dan berakibat pada terjadinya in-efisiensi (pemborosan). Kriteria pencapaian evaluasi SAKIP Kabupaten Jayawijaya tahun 2017, tergolong BERHASIL.

Tabel 3.7
Komponen Penilaian SAKIP

Komponen yang Dinilai		Bobot (%)	Nilai	
			2017	2017
a.	Perencanaan Kinerja	30	15,83	16,32
b.	Pengukuran Kinerja	25	7,66	9,26
c.	Pelaporan Kinerja	15	6,71	6,84
d.	Evaluasi Internal	10	2,74	2,91
e.	Capaian Kinerja	20	8,27	10,15
Nilai Hasil Evaluasi Kategori		100	42,91 C	45,47 C

Walaupun secara agregat dalam lima tahun periode pelaksanaan RPJMD, nilai evaluasi SAKIP tidak mengalami peningkatan, (predikat C), namun apabila ditilik dari unsur/komponen yang dinilai, dari tahun ke tahun, mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada table 3.6 diatas. Tingkat pencapaian ini, tentu akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah, untuk semakin memperbaiki manajemen internal, agar pemanfaatan sumber daya menjadi semakin efisien dan efektif mencapai sasaran yang ditentukan di waktu akan datang..

Opini BPK

Opini BPK merupakan hasil penilaian terhadap tingkat kepatuhan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah, dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan data tabel diatas, pada dua tahun awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jayawijaya, diperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan ke tingkat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adanya peningkatan ini menunjukkan terdapat itikad baik dan kemauan Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pelaporan semua transaksi keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan system akuntansi keuangan daerah, yang berbasis aplikasi Komputer sejak tahun 2006 yang terus dievaluasi setiap tahun dengan menyesuaikan peraturan dan kebutuhan daerah. Aplikasi yang ada saat ini adalah SIMDA Gaji, Aplikasi Pendapatan, Aplikasi Keuangan dan Aplikasi Aset.

Tabel 3.8
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2014-2018

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1.	2014	WDP	WDP	LHP. No. 02.A/LHP/XIX.JYP/05/2015 tanggal 6 Mei 2015
2.	2015	WDP	WTP	LHP. No. 08.A/LHP/XIX.JYP/05/2016 tanggal 30 Mei 2016
3.	2016	WDP	WTP	LHP. No. 06.A/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017
4.	2017	WDP	WTP	LHP. No. 08.A/LHP/XIX.JYP/05/2018 tanggal 04 Mei 2018
5.	2018	WTP		Masih menunggu hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2018

Jumlah produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD.

Lembaga Legislatif sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan khususnya pada aspek pengawasan sangat diperlukan perannya dalam merumuskan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Sesuai target RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2013 – 2018, telah diprogramkan sejumlah 32 Perda yang harus diselesaikan DPRD kabupaten Jayawijaya, namun dalam realisasinya, dapat dicapai sejumlah 30 Perda, atau sebesar 93,75 persen dari target RPJMD.

Evaluasi kinerja tahun 2018, menunjukkan bahwa dari sejumlah 6 Perda yang diagendakan dapat diselesaikan, ternyata hanya dapat direalisasikan sejumlah 5 Perda, atau sebesar 83,33 persen. Tingkat capaian ini tergolong dalam kategori SANGAT BERHASIL.

Berdasarkan Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 675 Tahun 2017 tentang Penetapan Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) Eksekutif Tahun 2018, adapun Raperda tersebut adalah :

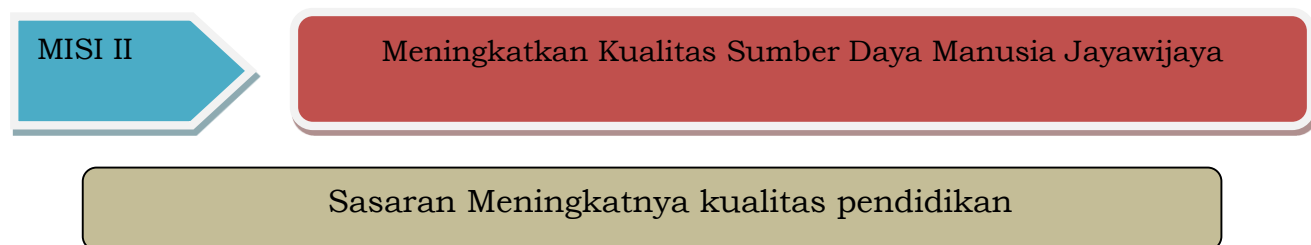
1. Penyelenggaraan E-Government
2. Badan Permusyawaratan Kampung
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung
4. Pajak Daerah
5. Retribusi Daerah
6. Pelayanan Pemakaman
7. Perizinan dan Non Perizinan

Namun berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 180.4/14088/SET tanggal 9 Oktober 2018 Perihal pengiriman 3 (tiga) Raperda yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya adalah Raperda :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah
3. Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Ketiga raperda tersebut telah disetujui bersama antara Legislatif dan Eksekutif. Sedangkan untuk Raperda Badan Permusyawaratan Kampung dan Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, tidak dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk Raperda Pelayanan Pemakaman disatukan dengan pembahasan Raperda Retribusi karena esensi isi raperda tersebut sama. Raperda Perizinan dan Non Perizinan diturunkan menjadi Peraturan Bupati. Sehingga target 6 perda ditahun terakhir masa dalam RPJMDD 2013-2018 tidak tercapai. Hanya tercapai 5 Raperda yang dibahas.

Keenam Raperda tersebut telah disetujui bersama antara Legislatif dan Eksekutif.



No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase angka melek huruf	53,08 %	64,28 %	67,44 %	74,20 %	54,63 %	74,20** %	135,82 %	Berhasil
2	Angka rata-rata lama sekolah	4,39 tahun	4,59 Tahun	4,74 tahun	4,99 Tahun	4,63 Tahun	4,99** Tahun	107,77 %	Sangat Berhasil

Persentase Angka Melek Huruf

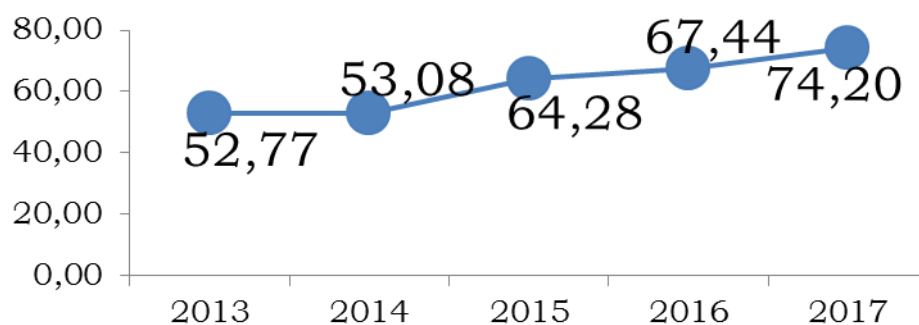
Melek aksara adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Secara konsep BPS AMH ialah Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas

yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Berdasarkan buku RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2013 -2018, telah ditetapkan adanya peningkatan jumlah angka melek huruf dari tahun 2014 sebesar 53,39 persen menjadi 54,63 persen pada akhir tahun periode (2018). Namun dalam pelaksanaannya, telah dapat dicapai peningkatan kinerja yang sangat signifikan, yaitu sebesar 74,20 persen pada akhir tahun 2018.

Evaluasi kinerja tahun 2018, menggambarkan adanya peningkatan capaian dibandingkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 135,82 persen, atau melebihi target dari rencana sebesar 54,63 persen sedangkan realisasinya menjadi 74,20 berhasil. Capaian kinerja pada aspek ini, tergolong SANGAT BERHASIL.

Gambar 3.1
Angka Melek Huruf Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2017



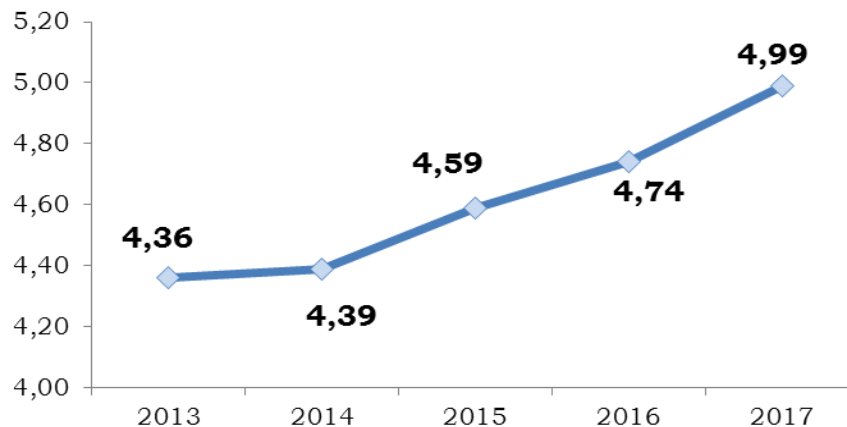
Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Dalam Angka (DDA), Tahun 2018

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Gambar 3.2
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Dalam Angka (DDA), Tahun 2018

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jayawijaya pada periode 2013-2017 mengalami trend pertambahan, dari tahun ke tahun, namun masih tergolong rendah, dan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berumur 15 tahun ke atas, tidak menamatkan pendidikannya pada tingkat Sekolah Dasar, hanya mencapai 5 tahun. Angka capaian ini, lebih rendah dari rata-rata lama sekolah pada tingkat Provinsi Papua yang sudah mencapai angka sebesar 6,27 tahun.

Evaluasi kinerja tahun 2018, menunjukkan adanya peningkatan capaian dibandingkan target yang direncanakan rata-rata 4,63 tahun, sedangkan dalam realisasinya telah dapat meningkat menjadi rata-rata 4,84 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2017), menunjukkan adanya kenaikan kinerja sebesar 107,77 persen.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Angka harapan hidup	57,79 Tahun	58,29 Tahun	58,48 Tahun	58,67 Tahun	66,92 Tahun	58,67* Tahun	87,67%	Sangat Berhasil
2.	Persentase Balita dengan gizi buruk		0,05 %	0,041 %	0,06%	0.02%	8,37%	-41,65 %	Tidak Berhasil
3.	Persentase cakupan pelayanan kesehatan		59,7%	70%	22,2%	55 %	35,8%	65,09%	Cukup berhasil
4.	IPM	53,37	54,18	54,18	55,99	59,17	55,99*	94,63%	Sangat Berhasil

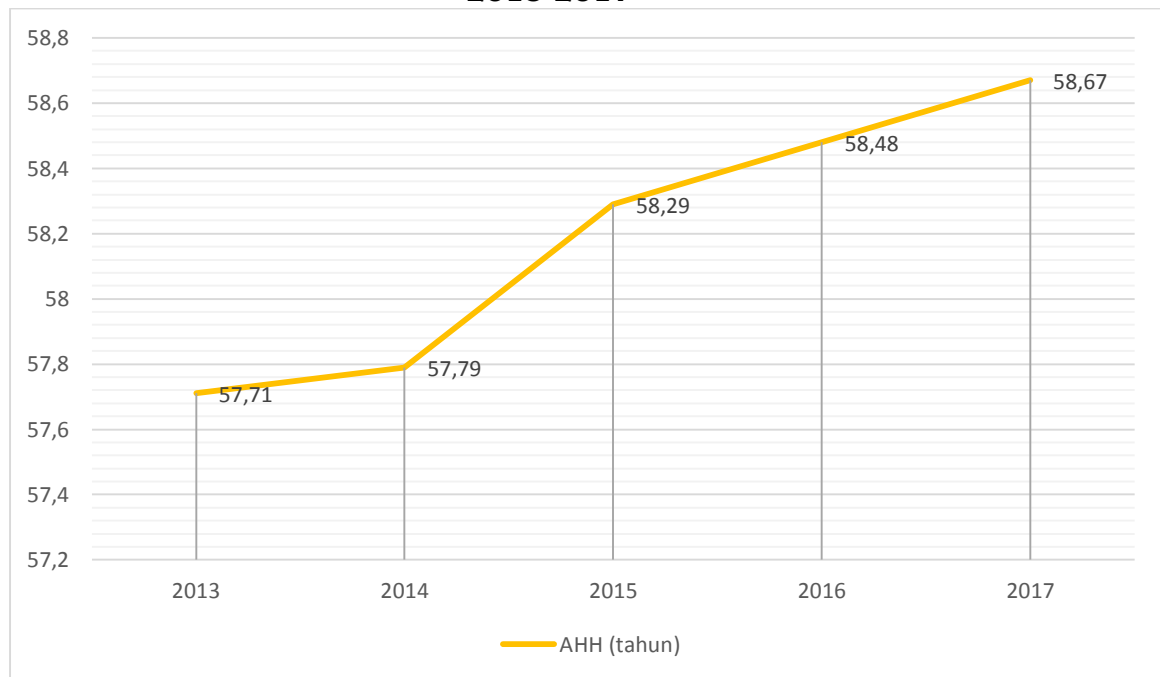
Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) mempresentasikan derajat kesehatan penduduk secara umum. Semakin tinggi AHH mengindikasikan bahwa semakin tinggi pula kualitas fisik/kesehatan penduduk suatu daerah. Selama periode 2014-2018, Kabupaten Jayawijaya telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) dari 57,79 tahun pada 2014, meningkat menjadi 58,67 tahun pada 2018 (akhir periode RPJMD). Angka tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam lima tahun terakhir. Walaupun mengalami peningkatan, namun capaian tersebut masih berada di bawah angka harapan hidup tingkat provinsi Papua yang sudah mencapai angka 65,14 tahun sedangkan pada tingkat nasional telah mencapai 70 tahun.

Jika pada tahun 2014 seorang bayi yang lahir mempunyai peluang untuk hidup hingga usia 57,79 tahun, nilainya terus meningkat menjadi 58,67 tahun pada tahun 2018 yang artinya bahwa secara rata-rata penduduk Jayawijaya dapat hidup hingga usia 58 tahun. Dengan nilai standar harapan hidup maksimal 85 tahun maka AHH penduduk Jayawijaya termasuk ke dalam kategori sedang.

Usia harapan hidup juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia. Meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir memberikan gambaran tentang perbaikan tingkat kesehatan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 3.3
Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir di Kabupaten Jayawijaya (tahun),
2013-2017



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya tahun 2018

Presentase Balita dengan Gizi Buruk

Jumlah balita dengan gizi buruk yang ditemukan selama tahun 2018 adalah 18 balita dari 5.578 balita yang ada, atau sebesar 8,37 persen. Sementara target yang ditetapkan adalah 0,02 persen. Angka ini menunjukkan kinerja rendah dalam upaya menekan angka gizi buruk pada balita. Apabila ditemukan adanya kasus, maka dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Tingkat capaian kinerja dalam mengurangi gizi buruk pada balita, tergolong dalam kategori TIDAK BERHASIL.

Apabila ditinjau dari aspek keberhasilan pelaksanaan selama periode RPJMD tahun 2014 – 2018, menunjukkan adanya ketidakberhasilan dalam menekan angka gizi buruk pada balita di kabupaten Jayawijaya. Pencapaian target tahun 2014 sebesar 0,05 persen, atau terdapat 5 balita gizi buruk per 100 balita, menjadi sebesar 0,02 persen pada tahun 2018, atau menjadi hanya 2 balita gizi buruk per 100 balita, tidak dapat dicapai, bahkan mengalami peningkatan menjadi 8 balita gizi buruk per 100 balita. Walaupun hasil kinerja menunjukkan kegagalan dalam mencapai target yang ditetapkan, tidaklah menggambarkan adanya ketidakpedulian terhadap masalah gizi buruk. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain pemberian makanan tambahan pada bayi yang mengalami kekurangan energy protein dan pemberian gizi bagi ibu hamil, serta inisiasi menyusui dini.

Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan

Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar berdasarkan laporan yang masuk dari 24 Puskesmas diperoleh realisasi capaian tahun 2018 yaitu sebesar 35,8 persen (72.190 orang). Angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 55 persen. Bila dibandingkan dengan capaian pelayanan kesehatan dasar tahun 2017 yaitu sebesar 22,2 persen, ada peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. Tingkat capaian pelayanan kesehatan tahun 2018, tergolong pada kategori CUKUP BERHASIL.

Bila ditinjau dari aspek keberhasilan selama periode pelaksanaan RPJMD 2014 – 2018, maka tingkat keberhasilan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, menunjukkan penurunan kinerja dari sebesar 59,70 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 35,80 persen pada tahun 2018. Tingkat capaian yang berkurang tersebut disebabkan petugas medis yang datang terlambat untuk memberikan pelayanan dan kurangnya pengawasan dari Kepala Distrik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka mutlak yang menggambarkan tingkat pencapaian manusia dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya. Index ini merupakan gabungan dari kinerja berbagai komponen seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponen pembentuknya.

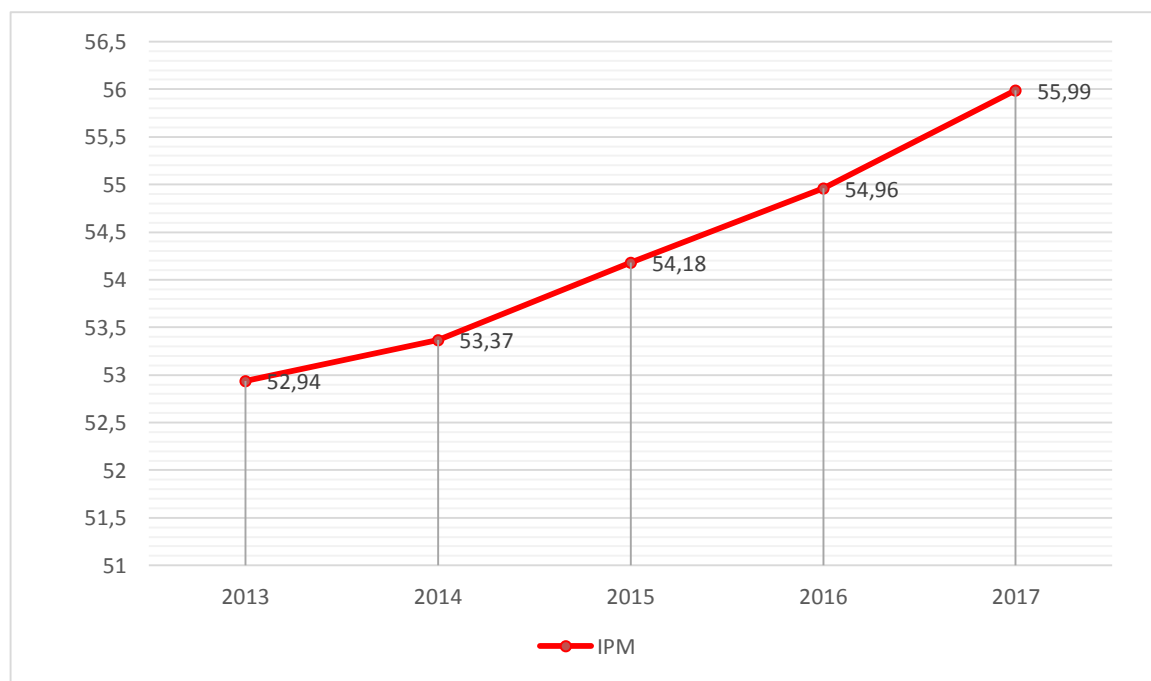
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya telah meningkat dari tahun 2014 sebesar 53,37, menjadi 55,99 pada tahun 2018. Walaupun demikian angka capaian ini belum memenuhi target RPJMD periode 2013-2018 yang ditargetkan sebesar 59,17. Angka capaian ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 4,9 persen dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD. Perkembangan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,28 persen kemudian perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya setiap tahunnya memiliki perkembangan yang fluktuatif dan diharapkan dapat terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan tahun 2018, menggambarkan belum tercapainya target yang direncanakan sebesar 59,17. Bila dibandingkan antara realisasi capaian sebesar 55,99 dan target (59,17), maka kinerja capaian sebesar 94,63 persen, dan termasuk kategori SANGAT BERHASIL.

Apabila diperbandingkan angka IPM yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya paada tahun 2018 sebesar 55,99, ternyata angka tersebut masih berada di bawah tingkat Provinsi Papua yang telah mencapai 59,09 Pencapaian angka IPM tersebut, telah menempatkan Kabupaten Jayawijaya pada posisi ke 14 dari seluruh kabupaten /kota di Provinsi Papua.

Gambar 3.4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya, 2013-2017



Sumber : BPS Kab. Jayawijaya 2018

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 3. 9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya Menurut Komponen,
2013-2017

KOMPONEN IPM	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	57,71	57,79	58,29	58,48	58,67
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10,46	10,64	10,28	11,01	11,30
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	4,36	4,39	4,59	4,74	4,99
Pengeluaran per Kapita (Juta)	6,87	6,99	7,07	7,28	7,52
IPM	52,94	53,37	54,18	54,96	55,99
Pertumbuhan IPM (%)	1,28	1,71	2,52	1,7	2,29

Sumber : BPS Kabupaten Jayawijaya, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap angka komponen penyusunan IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan baik dari segi kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Tetapi angka yang dicapai masih belum optimal sehingga diperlukan perumusan kebijakan terintegrasi untuk mendorong peningkatan angka IPM secara signifikan.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	87,84 %	88,17 %	88,17 %	88,79 %	31,01 %	88,79* %	286,33%	Sangat Berhasil

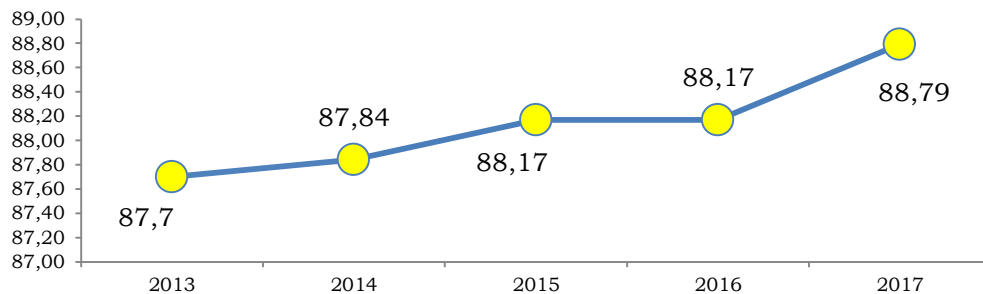
Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk kelompok umur usia 15 tahun keatas dan seharusnya sudah bekerja untuk menghidupi diri dan atau keluarganya. International Labour Organization (ILO), mengelompokkan angkatan kerja ini ke dalam dua kelompok yaitu, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Termasuk dalam kelompok bukan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas dan masih bersekolah. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), diperoleh dengan membandingkan antara angkatan kerja dan tenaga kerja yang secara nyata sudah bekerja.

Jika dibandingkan dengan target sasaran dalam RPJMD 2014 – 2018, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan tingkat yang jauh lebih tinggi, dimana target

rerata tahunan RPJMD sebesar 30 persen, namun dalam realisasi pelaksanaannya mencapai rerata 88 persen. Hal ini menggambarkan bahwa hampir semua pencari kerja di kabupaten Jayawijaya, dapat terserap dalam lowongan kesempatan kerja yang tersedia.

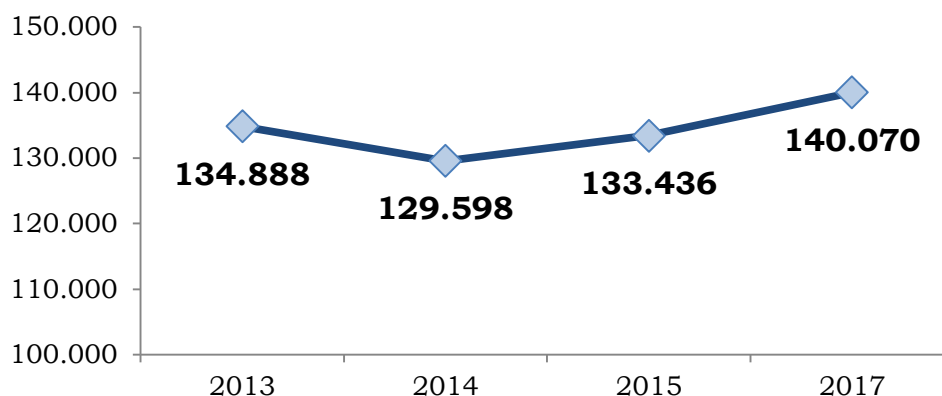
Gambar 3.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Dalam Angka (DDA), Tahun 2018

Jika dibandingkan dengan target sasaran dalam RPJMD 2014 – 2018, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan tingkat yang jauh lebih tinggi, dimana target rerata tahunan RPJMD sebesar 30 persen, namun dalam realisasi pelaksanaannya mencapai rerata 88 persen. Hal ini menggambarkan bahwa hampir semua pencari kerja di kabupaten Jayawijaya, dapat terserap dalam lowongan kesempatan kerja yang tersedia.

Gambar 3.6
Jumlah Orang Bekerja Di Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Dalam Angka (DDA), Tahun 2018

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase KK miskin	7,69 %	6,86 %	7,81 %	6,81 %	31,11 %	6,81 %	21,89 %	Tidak Berhasil

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Selama ini sering terjadi situasi kemiskinan relatif dimana pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Sesuai target penetapan RPJMD 2014-2018, diharapkan terjadinya pengurangan Kepala Keluarga (KK) Miskin sebesar 65,87 persen pada tahun 2014 dan sebesar 31,11 persen pada tahun 2018. Namun dalam realisasi pelaksanaan selama lima tahun periode RPJMD hanya mampu dicapai pengurangan KK miskin sebesar 7,69 persen pada tahun 2014, dan pada tahun 2018 hanya dapat dikurangi sebesar 6,81 persen. Data statistik menunjukkan populasi penduduk miskin di kabupaten Jayawijaya pada tahun 2018, sejumlah 77.437 KK atau sebesar 28,35 persen dari jumlah penduduk saat ini. Kondisi ini menggambarkan masih lemahnya dukungan terhadap kegiatan yang bersifat pemberdayaan, khususnya pada sector pertanian yang menampung 85 persen penduduk dan berdomisili di kampong-kampung. Kondisi nyata di Papua pada umumnya bahwa konsentrasi penduduk miskin berada di wilayah terpencil, terbelakang dan terjauh dari kota kabupaten.

Evaluasi capaian kinerja tahun 2018, menunjukkan bahwa dari target pengurangan KK miskin yang ditetapkan sebesar 31,11 persen, hanya dapat dicapai sebesar 6,81 persen atau sebesar kinerja 21,89 persen. Tingkat capaian pengurangan kemiskinan pada tahun 2018, tergolong dalam kriteria TIDAK BERHASIL.

Sasaran meningkatnya Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	42,43 %	65,59 %	67,91 %	68,30 %	89,65 %	69,65 %	77,69%	Berhasil

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan tingkat keberpihakan pada kaum perempuan dalam semua bidang pembangunan. Keberpihakan ini, memiliki dasar yang kuat, karena selain populasi penduduk perempuan yang besar, perempuan sangat menentukan keberlangsungan generasi suatu bangsa. Oleh karena itu harus dijaga dan dilindungi.

Sasaran target RPJMD kabupaten Jayawijaya 2014 -2018, adalah meningkatkan pelayanan terhadap kaum perempuan dan anak dalam lima tahun periode pelaksanaan. Pada tahun 2014 telah ditetapkan target capaian pelayanan sebesar 65,59 persen, dan dapat direalisasikan sebesar 42,43 persen. Sedangkan pada akhir tahun pelaksanaan, yaitu pada tahun 2018 ditargetkan capaian pelayanan sebesar 89,65 persen, namun hanya dapat dicapai sebesar 69,65 persen. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian target RPJMD tidak dapat dipenuhi, karena masih rendahnya tingkat realisasi dibandingkan target yang sudah ada. Namun, apabila ditinjau dari kinerja pada awal tahun RPJMD (2014) sebesar 42,43 persen dan diperbandingan dengan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 69,65 persen menunjukkan adanya peningkatan pelayanan yang dilakukan dalam lima tahun periode RPJMD.

Evaluasi capaian kinerja tahun 2018, yang mencapai 69,65 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 89,65 persen, menunjukkan tidak tercapainya pencapaian target. Tingkat capaian sebesar 77,69 persen, termasuk dalam kriteria BERHASIL.

Sasaran Meningkatkan Perekonomian Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1	PDRB Perkapita/bulan (Ribu Rp))	1,942	2,188	2,434	2.664	2,102	2,664**	126,74%	Sangat Berhasil
2	Pertumbuhan PDRB (persen))	7.07 %	6,28 %	4.66 %	5,52 %	6,45 %	5,52** %	85,58%	Sangat Berhasil
3	Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD	5,87 %	5,41 %	4,79 %	4,78 %	5 %	6,71 %	134,2%	Sangat Berhasil

PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yang dihitung atas perolehan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam wilayah tersebut. Semakin tinggi angka PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya.

Berdasarkan target RPJMD Kabupaten Jayawijaya 2014 – 2018, telah ditetapkan tingkat capaian PDRB Perkapita tahun 2014 sebesar Rp.1.914.000,- dan berhasil direalisasikan menjadi sebesar Rp.1.942.000,- yang berarti mengalami peningkatan dari target. Demikian pula pada akhir periode RPJMD (2018), ditetapkan target capaian sebesar Rp.2.102.000,- dan berhasil direalisasikan menjadi sebesar Rp.2.664.000,- . Jika ditinjau dari awal dan akhir tahun pelaksanaan RPJMD, menunjukkan adanya peningkatan PDRB Perkapita penduduk kabupaten Jayawijaya dari sebesar Rp.1.942.000,- pada tahun 2014 menjadi Rp.2.664.000,- pada tahun 2018, atau terjadi peningkatan sebesar 37,17 persen dalam lima tahun. Keberhasilan mendongkrak PDRB Perkapita penduduk, terutama disebabkan oleh adanya pertumbuhan lapangan usaha baru di luar sector pertanian, yang memberikan kontribusi yang semakin besar dalam lima tahun terakhir.

Evaluasi capaian kinerja tahun 2018, menunjukan tingkat capaian yang melebihi target, yaitu dari target sebesar Rp.2.102.000,- dapat direalisasikan menjadi sebesar Rp.2.664.000,-. Atau terjadi capaian kinerja sebesar 126,74 persen. Tingkat capaian kinerja PDRB Perkapita tahun 2018, tergolong dalam kategori SANGAT BERHASIL.

Jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita, antara kabupaten /kota yang ada di Provinsi Papua, maka kabupaten Jayawijaya menempati posisi ke 14 Dari 29 kabupaten/kota yang ada.

Tabel 3.10
PDRB, PDRB Per Kapita, PDRB Per kapita Per bulan, PDRB Per Kapita
(Ribu Rp), 2014-2016

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016*	2017**
PDRB (Juta Rp)	4.124.297	4.755.594	5.416.220	6.139.826	6.803.152
Jumlah Penduduk (Jiwa)	203.085	204.112	206.320	210.229	212.811
PDRB per Kapita (Ribu Rp)	20.308	23.299	26.251	29.205	31.968
PDRB per Kapita/Bulan (Ribu Rp.	1.692	1.942	2.188	2.434	2.664

Sumber : BPS Kabupaten Jayawijaya, 2017

**Angka Sementara*

*** Angka Sangat Sementara*

Pertumbuhan PDRB

Angka pertumbuhan PDRB per tahun, menggambarkan perkembangan aktifitas perekonomian wilayah, yang tercermin dalam 17 sektor produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Adanya pertumbuhan PDRB yang stabil atau meningkat dari tahun ke tahun, mengindikasikan semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Di dalam buku induk RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2014 – 2018, pertumbuhan PDRB dirancang mengalami kenaikan positif, selalu meningkat selama lima tahun. Target pertumbuhan PDRB pada awal periode ditetapkan sebesar 6,05 persen dan pada akhir periode ditetapkan sebesar 6,45 persen.

Realisasi capaian terhadap target tersebut, menunjukkan adanya pertumbuhan positif pada awal tahun pelaksanaan RPJMD, dimana tingkat capaian pada tahun 2014 sebesar 7,31 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2018 dapat dicapai sebesar 5,52 persen, berada di bawah target sebesar 6,45 persen. Terjadinya trend penurunan angka pertumbuhan PDRB kabupaten Jayawijaya selama periode lima tahun, tidak terlepas dari kinerja perekonomian nasional pada periode yang sama.

Evaluasi terhadap capaian kinerja pertumbuhan PDRB pada tahun 2018, dengan membandingkan target (6,45 persen) dan realisasi sebesar 5,52 persen, belum mencapai target yang direncanakan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2018 85,58 persen, tergolong SANGAT BERHASIL.

Tabel 3.11
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen),
2013-2017

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016*	2017**
1.	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	5,29	5,58	4,02	-1,57	2,57
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,94	4,91	2,83	2,83	4,29
3.	Industri pengolahan	5,23	3,88	2,70	3,87	3,33
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,66	2,05	-3,84	2,33	3,99
5.	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,31	2,82	2,37	2,87	2,95
6.	Konstruksi	12,20	8,06	9,11	6,89	7,13
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,44	7,51	7,64	7,38	7,74
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,02	7,75	9,09	5,47	5,53
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	9,19	7,97	7,19	6,65	6,81
10.	Informasi dan Komunikasi	5,62	6,92	3,30	3,30	3,37
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,84	6,47	0,47	5,20	3,35
12.	Real Estate	9,35	10,35	4,09	6,98	7,25
13.	Jasa Perusahaan	1,27	1,01	2,88	3,08	3,58
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,24	5,90	7,47	6,03	6,28
15.	Jasa Pendidikan	7,28	10,15	4,45	4,82	4,94
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,89	9,27	5,25	5,23	5,29
17.	Jasa lainnya	12,94	9,03	4,58	5,12	5,25
Produk Domestik Regional Bruto		7,31	7,07	6,28	4,66	5,52

Sumber : BPS Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

* Angka sementara

**Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayawijaya yang sebesar 5,52 persen; 1,26 persennya berasal dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 0,94 persen dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan; 0,89 persen dari lapangan usaha konstruksi; 0,76 persen dari lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; 0,46 persen dari lapangan usaha Real Estate; dan 1,21 persen sisanya berasal dari 12 lapangan usaha lain.

Prosentase Kontribusi PAD terhadap APBD

Berdasarkan buku RPJMD kabupaten Jayawijaya tahun 2014 – 2018, kontribusi/share Pendapatan Asli Daerah (PAD), dirancang terus meningkat dalam struktur pendapatan daerah selama periode lima tahun. Pada tahun 2014, kontribusi PAD ditetapkan sebesar 3 persen dan terus ditingkatkan menjadi 5 persen pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD daerah. Realisasi capaiannya pada tahun 2014 adalah sebesar 5,87 persen dan pada tahun 2018 mencapai 6,71persen. Secara nominal telah

terjadi peningkatan PAD sejak tahun 2014 yaitu sebesar Rp.62.533.965.367,- meningkat menjadi Rp.105.569.388.302,- pada akhir periode RPJMD. Meningkatnya peran PAD dalam struktur APBD, dimungkinkan karena keberhasilan melakukan intensifikasi pajak daerah melalui penyempurnaan regulasi. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama lima tahun pelaksanaan RPJMD kabupaten Jayawijaya, dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.12
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018

Sumber Pendapatan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pendapatan	1.067.154.645.682	1.335.006.059.942	1.467.240.987.034	1.496.028.526.952	1.573.404.128.032
Pendapatan Asli Daerah	62.533.965.367	74.572.888.807	69.994.661.991	75.889.520.464	105.569.388.302
Hasil Pajak Daerah	11.136.140.360	15.329.193.220	15.700.496.821	19.450.291.422	16.475.227.155
Hasil Retribusi Daerah	13.974.665.365	29.756.646.770	31.079.430.525	10.051.221.321	9.475.227.155
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.705.465.135	2.204.929.019	7.229.677.627	-	1.300.287.341
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah	30.717.694.507	27.282.119.789	15.985.057.018	46.388.007.721	78.732.771.383

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

Capaian prosentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD tahun 2018 sebesar 6,71 persen melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMDD yaitu 5 persen. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 95.106.533.601,- dan realisasi sebesar Rp. 105.569.388.302,- dengan capaian 111 persen. Tingkat capaian kontribusi pendapatan asli daerah dalam struktur APBD tahun 2018, tergolong dalam kriteria SANGAT BERHASIL.

Komposisi sumber PAD yang memberikan kontribusi dalam struktur APBD kabupaten Jayawijaya pada tahun 2018, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Pendapatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

Sumber PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Jumlah Pendapatan	1.572.990.368.577	1.573.404.128.032	100,02 %
Pendapatan Asli Daerah	95.106.533.601	105.569.388.302	111 %
Hasil Pajak Daerah	12.708.200.000	16.475.227.155	129,64%
Hasil Retribusi Daerah	8.707.100.000	9.475.227.155	108,82 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.229.677.627	1.300.287.341	17,98%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	66.461.555.974	78.732.771.383	118,46 %

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

Secara nominal terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari target yang ditetapkan sebelumnya pada semua sumber PAD, kecuali Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan hanya tercapai Rp. 1.300.287.341,- dari target Rp. 7.229.677.627 dengan capaian 17,98 persen. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.

Sasaran Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1	Produksi dan produktivitas bahan pangan utama	91,072 Ton	176,50 Ton	73,994 Ton	90,64 Ton	182,316 Ton	131,55 Ton	72,15 %	Berhasil

Produksi dan produktivitas bahan pangan utama lainnya

Sektor pertanian merupakan sector basis dalam perekonomian daerah kabupaten Jayawijaya, karena didukung oleh ketersediaan sumberdaya yang melimpah. Makanan pokok penduduk adalah hipere, dan beras. Hampir semua jenis tanaman pertanian tanaman pangan, sayuran dan perkebunan, dapat tumbuh sangat baik dengan kualitas organic.

Di dalam buku RPJMD kabupaten Jayawijaya tahun 2014 – 2018, ditetapkan indikator kinerja produksi dan produksitifitas tanaman pangan utama, sebagai ukuran melihat perkembangan sector ekonomi local dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD daerah. Berdasarkan table diatas, menggambarkan terjadinya produksi bahan mentah

pangan utama yang semakin menurun sejak awal pelaksanaan RPJMD kabupaten Jayawijaya. Pada tahun 2014, target total produksi ditetapkan sebesar 145,712 ton, namun hanya dapat direalisasi sebesar 91,072 ton. Pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD (2018), total produksi bahan mentah tanaman pangan utama ditargetkan sebesar 182,316 ton, namun dalam realisasinya hanya dapat dicapai sebesar 131,55 ton, atau 72,15 persen. Bahkan dalam tahun pelaksanaan 2016 dan 2017, tingkat produksi berada jauh dibawah target yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 73,994 ton pada tahun 2016 dan 90,64 ton pada tahun 2017.

Tidak tercapainya target-target yang ditetapkan, disebabkan menurunnya tingkat produktifitas pada hampir semua komoditi tanaman utama seperti Ubi Jalar (Hipere), padi sawah, jagung, kacang hijau, kedelai, ubi kayu dan keladi. Selain itu, disebabkan semakin meluasnya lahan pertanian yang tidak digarap/terlantar dan tidak produktif.

Evaluasi terhadap realisasi produksi tanaman pangan utama pada tahun 2018, menghasilkan data produksi sebesar 131,55 ton, atau tidak mencapai target yang diharapkan sebesar 182,316 ton bahan mentah. Tingkat capaian hanya sebesar 72,15 persen dari target yang ditetapkan. Kriteria capaian kinerja pada tahun 2018, tergolong BERHASIL.

Tabel 3.14
Produksi dan Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal
di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal (ton)	91.072	87.187	73.989	74.536	75.412
2.	luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal (Ha)	9.594	9.089	5.518	5.296	5.402

Dinas : Pertanian Kabupaten Jayawijaya, 2018

Sasaran Meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan yang berkualitas dan merata.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	2,96 %	3,04 %	3,69 %	4,40 %	7,50 %	5,06 %	67,47 %	7,50 %

Pembangunan infrastruktur menjadi pendorong utama berkembangnya perekonomian daerah, pertumbuhan wilayah dan transportasi publik. Oleh karena itu, sektor ini dijadikan sebagai leading sektor selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2018, proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik terealisasi 5,06 persen dari target 7,50 persen dengan capaian sasaran sebesar 67,47 persen. Panjang jalan yang direncanakan untuk di bangun, ditingkatkan dan dipelihara adalah 393,85 km, namun yang dapat direalisasikan 380,13 km sehingga yang tidak dapat direalisasikan sepanjang 13,72 km. Kondisi ini disebabkan karena pembiayaan program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan tiap tahunnya tidak sesuai dengan rencana pembiayaan dalam Renstra OPD. Dari keseluruhan panjang jalan tahun 2018 yaitu 380,13 km dengan kondisi sebagai berikut :

- Kondisi baik 256,46 km atau 64,47 persen
- Kondisi sedang 10,97 km atau 2,89 persen
- Kondisi rusak ringan 61,20 km atau 16,10 persen
- Kondisi rusak berat 51,49 km atau 13,55 persen.

Perkembangan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2018

Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	100,08 km	227,80 km	250,78 km	256,23 km	298,03 km	256,46 km
Panjang Jaringan Jalan Seluruhnya	290,75 km	307,84 km	329,98 km	347,19 km	372,54 km	380,13 km
Capaian Kinerja	34,42 %	74 %	76 %	73,80 %	80 %	64,47 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

Sasaran Meningkatnya Pemukiman Layak Huni

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	4,21 %	5,08 %	4,72 %	9,074 %	9,54 %	9.82 %	102,93%	9,54 %

Berdasarkan buku RPJMD kabupaten Jayawijaya tahun 2014-2018, pada awal tahun pelaksanaan RPJMD, ditargetnya tersedianya rumah layak huni sebesar 13,93 persen dari total perumahan yang ada, dan diharapkan menjadi 9,54 persen pada akhir tahun RPJMD (2018). Sesuai realisasi capaian kinerja aspek ketersediaan rumah layak huni, pada tahun 2014, hanya mampu dicapai sebesar 4,21 persen dari target sebesar 13,93 persen. Pada tahun 2018 dapat dicapai 9,82 persen atau sejumlah 4.672 unit rumah layak huni. Jika dibandingkan antara ketersediaan rumah layak huni pada tahun awal dan akhir pelaksanaan RPJMD, menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni sebesar 5,61 persen dalam lima tahun.

Realisasi ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 sebanyak 4.672 unit rumah sedangkan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 sebanyak 47.533 unit. Sehingga cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2018 sebesar 9,82 persen melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMDD 2013-2018 yaitu 9,54 persen. Tingkat capaian kinerja penyediaan rumah layak huni, melebihi target (102,93 persen). Jika dibandingkan dengan tingkat pencapaian tahun sebelumnya pada tahun 2017 (9,074 persen) maka terjadi peningkatan kinerja penyediaan rumah layak huni. Tingkat capaian kinerja diatas, tergolong dalam kategori SANGAT BERHASIL.

Jumlah layak huni di Kabupaten Jayawijaya yang dibangun tahun 2018 sebanyak 305 unit, jumlah tersebut terdiri dari sumber dana APBD Kabupaten (OTSUS) dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Perumahan Khusus (100 unit) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan sumber dana APBN
 - a. Distrik Muliama 25 unit
 - b. Distrik Wsaput 10 unit
 - c. Distrik Walelagama 15 unit
 - d. Distrik Wamena 10 unit
 - e. Distrik Hubikiak 6 unit
 - f. Distrik Wouma 4 unit
 - g. Distrik Asotipo 25 unit
2. Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 175 penerima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan sumber dana APBN.
 - a. Distrik Tagme sebanyak 20 KK
 - b. Distrik Koragi sebanyak 20 KK
 - c. Distrik Bolakme sebanyak 35 KK
 - d. Distrik Asotipo sebanyak 40 KK
 - e. Distrik Kurulu sebanyak 30 KK
 - f. Distrik Siepkosi sebanyak 30 KK
3. Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat Type 36 sebanyak 30 unit dari sumber dana OTSUS APBD
 - a. Distrik Tagime 5 unit
 - b. Distrik Molagalome 5 unit
 - c. Distrik Wadangu 3 unit
 - d. Distrik ItlayHisage 5 unit
 - e. Distrik Pisugi 5 Unit
 - f. Distrik Muliama 7 unit

Sasaran Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sd				Kinerja Tahun 2018			Kriteria
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian	
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	5,61 %	13,25 %	13,25 %	-	20,91 %	13,25 %	63,37%	Cukup Berhasil

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa realisasi kinerja rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2018 sebesar 13,25 persen lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 20,91 persen yang berarti terdapat selisih sebesar 7,66 persen. Luasan rehabilitasi hutan pada tahun 2014-2016 telah mencapai 13,25 persen dari luas hutan dan lahan kritis 8.918,75 Ha, sehingga persentase luasan kerusakan hutan dan lahan yang perlu dilakukan rehabilitasi masih tersisa sekitar 86,75 persen perlu terus dilakukan. Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2017 Urusan Kehutanan menjadi kewenangan Provinsi Papua sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga program dan kegiatan untuk mendukung urusan kehutanan tidak dilakukan lagi oleh pemerintah Kabupaten.

3.3 Realisasi Anggaran

Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan sebesar Rp. 1.572.990.368.577,- dan terealisasi Rp. 1.561.012.273.705,- atau 99,24 persen Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan sebesar Rp. 1.251.476.296.690,- dapat direalisasi Rp. 1.193.536.777.264,- atau 95,37 persen. Rincian pendapatan dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Unaudited)
Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	REFF	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
PENDAPATAN	4.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.1.1.1	95.106.533.601	93.177.533.976	97,97	75.889.520.464
Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1.1.1	12.708.200.000	16.064.007.427	126,41	19450.291.422
Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.1.1.2	8.707.100.000	9.472.322.155	108,79	10.051.221.321
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.1.1.3	7.229.677.627	1.300.287.341	17,99	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.1.1.1.4	66.461.555.974	66.340.917.053	99,82	46.388.007.721
PENDAPATAN TRANSFER	4.1.1.2	1.429.594.055.976	1.425.455.066.729	99,71	1.305.903.965.775
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	4.1.1.2.1	1.040.380.266.000	1.039.539.625.644	99,92	913.686.129.002
Dana Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.1.1	16.420.465.000	12.163.748.190	74,08	13.103.262.817
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.1.1.2.1.2	29.009.631.000	44.715.531.314	154,14	10.351.202.678
Dana Alokasi Umum	4.1.1.2.1.3	714.016.533.000	714.016.533.000	100,00	724.393.394.000
Dana Alokasi Khusus	4.1.1.2.1.4	233.703.000.000	228.418.346.832	97,74	135.964.492.097
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.1.1.2.1.5	47.230.637.000	40.225.466.308	85,17	29.873.777.410
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	4.1.1.2.2	374.473.045.000	369.862.120.000	98,77	375.825.831.000
Dana Otonomi Khusus	4.1.1.2.2.1	117.040.104.000	120.679.179.000	103,11	117.040.104.00
Dana Desa	4.1.1.2.2.2	240.932.941.000	240.932.941.000	100,00	251.285.727.000
Dana Insetif Daerah	4.1.1.2.2.3	16.500.000.000	8.250.000.000	50,00	7.500.000.000
Transfer Pemerintah Provinsi	4.1.1.2.3	14.740.744.976	16.053.321.085	108,90	16.392.005.773
Dana Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.3.1	14.740.744.976	16.053.321.085	108,90	16.392.005.773
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.1.1.3	48.289.779.000	42.379.673.000	87,76	114.235.040.713
Pendapatan Hibah	4.1.1.3.1	-	-	-	797.361.713
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.1.1.3.2	48.289.779.000	42.379.673.000	87,76	113.437.679.000
JUMLAH PENDAPATAN		1.572.990.368.577	1.561.012.273.705	99,24	1.496.028.526.952
BELANJA	4.1.2				
Belanja Operasi	4.1.2.1	949.865.173.843	904.804.616.246	95,26	885.719.617.607
Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	407.626.436.738	393.267.818.514	96,48	397.734.740.067
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.2	405.662.016.615	390.972.494.612	96,37	413.349.380.040
Belanja Subsidi	4.1.2.1.3	-	-	-	11.602.080.000
Belanja Hibah	4.1.2.1.4	134.726.720.490	118.854.303.120	88,22	61.553.417.500
Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.5	1.850.000.000	1.755.000.000	94,86	1.480.000.000
Belanja Modal	4.1.2.2	297.611.122.847	284.827.681.774	95,70	355.433.676.211
Belanja Tanah	4.1.2.2.1	4.150.00.000	4.000.000.000	96,39	12.950.000.000
Belanja Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.2	58.711.133.152	55.370.726.103	94,31	27.729.414.207
Belanja Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.3	168.280.633.285	160.498.456.310	95,38	171.715.988.754
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.1.2.2.4	65.089.190.410	63.610.293.361	97,73	140.516.273.250
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	1.380.166.000	1.348.116.000	97,68	2.522.000.000
Belanja Tidak Terduga	4.1.2.3	4.000.000.000	3.904.479.244	97,61	50.296.733
Belanja Tidak Terduga	4.1.2.3.1	4.000.000.000	3.904.479.244	97,61	50.296.733
JUMLAH BELANJA		1.251.476.296.690	1.193.536.777.264	95,37	1.241.203.590.551
TRANSFER	4.1.3				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	4.1.3.1	5.216.491.528	5.198.495.500	99,66	1.924.376.000
Bagi Hasil Pajak	4.1.3.1.1	5.216.491.528	5.198.495.500	99,66	1.924.376.000
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	4.1.2.3	351.776.892.842	350.970.049.387	99,77	328.580.733.942

URAIAN	REFF	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	4.1.2.3.1	349.905.322.900	349.905.192.900	100,00	326.709.164.000
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4.1.2.3.2	1.871.569.942	1.064.856.487	56,90	1.871.569.942
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		356.993.384.370	356.168.544.887	99,77	330.505.109.942
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		1.608.469.681.060	1.549.705.322.151	96,35	1.571.708.700.493
SURPLUS/(DEFISIT)		(35.479.312.482)	11.306.951.554	(31,87)	(75.680.173.541)
PEMBIAYAAN	4.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.4.1	35.479.312.482	10.943.336.586	30,84	86.614.026.023
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	4.1.4.1.1	35.479.312.482	10.943.336.586	30,84	86.614.026.023
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.1.4.2	-	-	-	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.1.4.2.1	-	-	-	
PEMBIAYAAN NETTO		35.479.312.482	10.943.336.586	30,84	86.614.026.023
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)		-	22.250.288.140	-	10.933.852.482

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018



Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 disusun sesuai dengan penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018. Laporan ini merupakan upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atas penggunaan berbagai sumber daya khususnya keuangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga seluruh penggunaan sumber daya dipertanggungjawabkan bukan sekadar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan tujuan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Beberapa kesimpulan terkait dengan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018, yaitu antara lain :

1. Pengukuran kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis dari prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menunjukkan capaian indikator kinerja utama tahun 2018 sebesar 86,43 persen, walaupun ada beberapa indikator yang kurang baik yaitu persentase balita gizi buruk dan persentase KK Miskin.
2. LAKIP disusun dengan pendekatan kuantitatif atas capaian indikator kinerja masing- masing sasaran strategis dari prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut, bisa jadi belum mampu memberikan informasi yang utuh terhadap berbagai aspek capaian kinerja pembangunan.
3. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap kebijakan dan pelaksanaan program selama tahun 2018 yang bisa menjadi umpan balik bagi pelaksanaan kebijakan dan program tahun yang

akan datang, khususnya indikator yang pencapaian kinerjanya kurang baik.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses penyusunan LKJIP Kabupaten Jayawijaya yang menyebabkan belum tersusunnya dokumen LKJIP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 secara maksimal sesuai dengan tata cara dan mekanisme penyusunan LKJIP antara lain adalah :

1. Penyesuaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana RPJMD yang telah ditetapkan, masih belum secara keseluruhan dapat dipahami dan terakselerasi dengan perencanaan OPD. Kondisi ini menyebabkan pada beberapa indikator kinerja sasaran yang dipaparkan belum memiliki data dan informasi pendukung yang mencukupi.
2. Masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tepat, sesuai dan relevan dengan sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan, hal ini menyebabkan penjelasan atas analisis kinerja belum dapat dideskripsikan secara akurat.

Berkenaan dengan kendala-kendala tersebut di atas, saran, usulan, langkah tindak lanjut yang dapat disampaikan dan dilaksanakan yaitu :

1. Perlu adanya penelaahan lebih lanjut dan perumusan kembali atas beberapa indikator kinerja daerah dan indikator kinerja sasaran sehingga dapat memilah indikator kinerja utama (prioritas) dari indikator-indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.
2. Perlu dilaksanakannya pembinaan penyusunan Indikator Kinerja Utama pada setiap OPD, dalam proses perbaikan dan perubahan RENSTRA OPD yang mengacu pada RPJMD periode baru tahun 2018-2023 yang merupakan landasan perencanaan program dan kegiatan OPD.
3. Perlu dilaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan secara intensif dan menyeluruh pada segenap aparatur pemerintah, agar setiap individu memahami target kinerja yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
4. Perlu peningkatan kualitas pengendalian, koordinasi, dan sistem informasi kinerja sehingga dapat memantau dan mengintegrasikan informasi kinerja secara menyeluruh dalam satu bentuk kegiatan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum mampu secara sempurna menyajikan data dan informasi dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Namun demikian dengan segala keterbatasan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja ini, kami berharap

bahwa LKJIP tahun 2018 ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018, dan khususnya dapat menjadi bahan evaluasi pada proses perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di masa yang akan datang.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA



PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WEMPI WETIPO, SH, MH**

Jabatan : **BUPATI JAYAWIJAYA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wamena, 17 Januari 2018



**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur daerah yang berpendidikan S1, S2 dan S3	50%
2.	Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan	Presentase tersedianya informasi RTRW serta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital	60%
3.	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat	Persentase kepemilikan KTP	32 %
4.	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparansi	Nilai evaluasi SAKIP	60 (CC)
		Opini BPK	WTP
		Persentase tingkat capaian IKU daerah	80%
		Jumlah Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD	6
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Persentase angka melek huruf	54,63%
		Angka rata-rata lama sekolah	4,63
6.	Meningkatnya kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	66,92 Tahun

		Persentase Balita dengan gizi buruk	0,02%
		Persentase cakupan pelayanan kesehatan	55%
		IPM	59,17
7.	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan	Angka partisipasi angkatan kerja	31,01%
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial	Persentase KK Miskin	31,11%
9.	Meningkatnya pelayanan perempuan terhadap anak	Indeks Pembangunan Gender	89,65%
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB perkapita	2.102 (ribu)
		Pertumbuhan PDRB	6,45 %
		Persentase kontribusi PAD	5 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		terhadap APBD	
11.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	Produksi dan Produktivitas pangan utama dan lokal	182,316 Ton
12.	Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan yang berkualitas dan merata	Persentase proporsi panjang jalan dan jembatan baik	7,50%
13.	Meningkatnya pemukiman layak huni	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	9,54%
14.	Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup	Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan kritis	28,12%

1. Program pembinaan dan pengembangan aparatur Rp. 1.660.000.000
2. Program penataan administrasi kependudukan Rp. 2.666.953.000

3.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.	2.532.944.000
4.	Program penataan peraturan perundang-undangan	Rp.	2.449.999.800
5.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah)	Rp.	1.118.800.000
6.	Program wajib belajar pendidikan Dasar Sembilan tahun	Rp.	43.524.825.900
7.	Program pendidikan Nonformal	Rp.	2.100.000.000
8.	Program perbaikan gizi masyarakat	Rp.	1.075.000.000
9.	Program Upaya kesehatan masyarakat	Rp.	28.510.337.744
10.	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rp.	86.209.013.380
11.	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rp.	225.000.000
	Program peningkatan kesempatan kerja	Rp.	75.000.000
12.	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp.	240.802.080
13.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp.	350.000.000
14.	Program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	Rp.	250.000.000
15.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Rp.	150.000.000
16.	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Rp.	250.000.000

17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rp.	150.000.000
18.	Program peningkatan kesejahteraan petani	Rp.	500.000.000
19.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp.	4.473.000.000
20.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp.	900.000.000
21.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp.	150.000.000
22.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp.	29.387.000.000
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp.	1.386.862.861
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp.	3.200.000.000
23.	Program pengembangan perumahan (Kegiatan pembangunan sarana prasarana rumah sederhana sehat)	Rp.	15.925.000.000

Wamena, 17 Januari 2018





**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

MENGANUGERAHKAN

PENGHARGAAN

KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

SEBAGAI KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2017

JAKARTA, 5 DESEMBER 2018



YASONNA H. LAOLY



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

MENGANUGERAHKAN

PENGHARGAAN

KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

SEBAGAI KABUPATEN CUKUP PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2016

JAKARTA, 5 DESEMBER 2017

YASONNA H. LAOLY



PENCANANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA 40 DISTRIK, 40 KAMPUNG

WAMENA, 6 SEPTEMBER 2018

KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI PAPUA


Sailes Brabar, SE. M.Si

 BUPATI JAYAWIJAYA

Wempi Wetipo, SH, MH

KEPALA DISTRIK KURULU


Judas Dabi S.Pt

KEPALA KAMPUNG YIWIKA


Defen Dabi



DEPARTEMEN KEHUTANAN
Nomor : SK. 281/MENHUT-II/2008

PIAGAM

Diberikan kepada

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
PROV. PAPUA**

sebagai

KABUPATEN PEDULI KEHUTANAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI
Dalam Rangka Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Tahun 2008

Jakarta, 15 Agustus 2008
MENTERI KEHUTANAN RI,

Dr. (H.C) M.S. KABAN



DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ADVOCACY INSTITUTIONS
(LEADHAM INTERNATIONAL)
SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-19.AH.01.07 Tahun 2013
Office : Cempaka Putih Tengah XXI No. 4 Jakarta Pusat

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA


Atas kebersamaannya sebagai Mitra Kerja Leadham Internasional dalam
Mewujudkan Visi dan Misi Bangsa dan Negara RI, Sehingga tercapai masyarakat
yang adil dan makmur, sejahtera, bermartabat, berbudaya dan memiliki jati diri,
kepribadian yang berkarakter ilahi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

"Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan; hanya cahaya yang bisa melakukannya.
Kebencian tidak akan mampu menghapus kebencian, hanya cinta yang mampu melakukannya."
"Tidak semua orang bisa menjadi terkenal namun semua orang bisa menjadi hebat,
karena kehebatan ditentukan oleh pelayanan."

God Is Love
Kekuatan Terdahsyat Adalah
Cinta dan Kasih Sayang

Jakarta, 11 Oktober 2018
Ketua Umum
Leadham Internasional




(Yusuf L. Tobing, S.Th, MA)

Diagam Penghargaan

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Penghargaan ini Diberikan kepada :

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

sebagai Apresiasi atas Tingginya Tingkat Kepatuhan dan Tingkat Keaktifan Pengelolaan LHKPN



Desember 2016

Agus Rahardjo
Agus Rahardjo
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Memberikan Penghargaan Kepada
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

Atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan
Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

SRI MULYANI INDRAWATI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Memberikan Penghargaan Kepada
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan
Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan Capaian Standar Tertinggi
dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

SRI MULYANI INDRAWATI